

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL
REGIONAL TERHADAP INFLASI DI PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR (PERIODE 2001 – 2008)**



TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Oleh
Marius Masri
NIM:C4B008018

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

TESIS
ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL REGIONAL
TERHADAP INFLASI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
(PERIODE 2001 – 2008)

disusun Oleh

Marius Masri
NIM:C4B008018

telah dipertahankan di Depan Dewan penguji pada tanggal 31 Maret 2010
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing Utama

Anggota Penguji

Drs. Wiratno, MEd

Prof. Dr. Purbayu BS. MS

Dosen Pembimbing Pendamping

Dr. Dwisetia Poerwono MSc

Drs. Maruto Umar Basuki, MSi

Drs. Nugroho S.B.M. MT

Telah dinyatakan lulus Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Tanggal

Ketua Program Studi

Prof. Drs. Waridin MS, PhD

ABSTRACT

Local autonomy and fiscal decentralization policies are aimed to reduce fiscal disparity among areas, to provide better and efficient public goods and services, and to make the government keep in touch with their people. The main instrument of fiscal decentralization policy is fund transfer policy to region that consists of Dana Bagi Daerah (DBD), Dana Alokasi Umum (DAU), and Dana Alokasi Khusus (DAK). Fund transfer to region will influence the APBD.

The local government expenditure changes in form of expansion or contraction will influence the amount of money outstanding and price stabilization. Price stabilization is one of development goals, both nationally and regionally. Price stability is viewed from inflation. Inflation by demand side is caused by government expenditures. This study focused on the effects of local government expenditure on regional inflation in NTT.

The method used in this study is data panel that include twelve Kabupaten/Cities to describe regional inflation behavior. Observation data covers 2001-2008 periods. The data was regressed by fixed effects model (FEM), using Eviews and SPSS software package. This study examines the influences of regional fiscal policy variables namely employees expenditure, operating expenditure, capital expenditure, and fiscal decentralization reform on inflation.

The results show that employees expenditure and operating expenditure have positive and significant influences on inflation at $\alpha = 5\%$, whereas capital expenditure and fiscal decentralization reform has positive and significant influence on inflation at $\alpha = 1\%$. Government expenditure can affect inflation, therefore, the author suggests that government expenditure prioritized on public interests such as capital expenditure and investment that can improve goods and services output to maintain price stability, are used to finance government employees' and operating last for government programs.

Keywords: Inflation, employees' expenditure, operating expenditure, capital expenditure, fiscal decentralization reform

ABSTRAKSI

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara daerah, menyediakan barang dan jasa publik yang lebih baik dan lebih efisien, serta mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Instrumen utama kebijakan desentralisasi fiskal adalah kebijakan transfer dana ke daerah, yang terdiri atas dana perimbangan dan dana otonomi khusus. Dana perimbangan tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Transfer dana ke daerah akan mempengaruhi APBD.

Perubahan belanja pemerintah daerah bersifat ekspasif atau kontraksi mempengaruhi jumlah uang beredar dan stabilitas harga. Stabilitas harga merupakan salah satu sasaran pembangunan, baik secara nasional maupun secara regional. Stabilitas harga dilihat dari inflasi. Inflasi karena tarikan permintaan disebabkan oleh pengeluaran pemerintah. Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap inflasi regional di Provinsi NTT.

Metode yang digunakan adalah panel data, mencakup duabelas Kabupaten/Kota untuk menggambarkan perilaku inflasi regional. Data observasi meliputi periode tahun 2001-2008. Data diregresi dengan menggunakan fixed effects model (FEM), dengan menggunakan alat bantuan software Eviews 6 dan SPSS 17. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis seberapa besar pengaruh variabel-variabel kebijakan fiskal regional yakni belanja pegawai, belanja operasional, belanja modal, dan reformasi desentralisasi fiskal terhadap inflasi.

Hasil perhitungan diperoleh, belanja pegawai dan belanja operasional berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap inflasi, sedangkan belanja modal dan dummy reformasi desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 1\%$ terhadap inflasi. Belanja pemerintah dapat mempengaruhi inflasi, sehingga peneliti menyarankan agar belanja pemerintah diprioritaskan untuk kepentingan publik seperti belanja modal atau investasi karena dapat meningkatkan output barang dan jasa sehingga dapat menjaga stabilitas harga. Sedangkan belanja pegawai dan belanja operasional digunakan untuk kepentingan operasional kegiatan dan program pemerintah.

Kata kunci: inflasi, belanja pegawai, belanja operasional, belanja modal, dan reformasi desentralisasi fiskal.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat, petunjuk, kasih, dan pertolongan-NYA, sehingga tesis ini dapat rampung. Penulisan tesis ini disadari melalui proses yang tidak luput dari berbagai kendala atau hambatan. Semua itu menjadi pengalaman berharga bagi penulis, dalam mengakhiri jenjang pendidikan studi S2 di UNDIP Semarang. Namun berbagai bantuan semua pihak, baik saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini penulis ucapkan limpah terimah kasih.

Lembaran ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimah kasih dan penghargaan yang tulus kepada;

1. Bapak Drs. Wiratno, MEd selaku pembimbing utama, dan Bapak Maruto Umar Basuki, MEd selaku pembimbing pendamping, atas kesabaran dan kesediaannya dalam membimbing penulis.
2. Bapak/Ibu Dosen Program MIESP Studi UNDIP, yang telah memberikan berkah ilmu kepada penulis, dan seluruh staf Administrasi Program Studi MIESP UNDIP, yang telah memberikan pelayanan selama ini.
3. Pimpinan Yapenkar Kupang dan Rektor UNIKA Widya Mandira Kupang, yang memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan S2.
4. Orang tua tercinta, Alm Bpk Silivester Prins Sadipun dan Mama Maria Natalia Idong, yang telah membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis dengan kasih sayang, dari lubuk hati terdalam penulis persembahkan terimah kasih tak terhingga dan penghargaan yang tulus atas kebaikan mereka. Tak lupa penulis ucapkan terimah kasih dan penghargaan kepada adik-adikKu tercinta, Sisilia Florida Leonid Sadipun, Maria Erni Sadipun, dan Ipar David Daud Jeradu beserta ponaanKu Glen, dan Rosa, atas doa dukungannya.

5. Istri Tersayang Yuliana Senu Sadipun, yang mengijikan dan mendukung suami tercinta dalam doa, untuk menggapai cita-cita, dalam menyelesaikan pendidikan S2. Tak lupa juga ucapan terima kasih dan penghargaan kepada mertua alm Bpk. Yakobus Paro dan Mama Wilhemian atas doanya.
6. Teman-teman, Pak Zul, Pak Aan, Pak Yohan, Ibu Maal, Ibu Lala, Ibu Seri, Ibu Frida, Mba Rati, Mba Lira, singkatnya teman-teman angkatan XIV Program Studi MIESP UNDIP, penulis ucapkan terima kasih atas kebaikan semoga Tuhan memberkati kita semua.
Akhirnya penulis menyadari bawah, tesis ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, yang tentunya menjadi tanggungjawab penulis dan selanjutnya diperbaiki untuk penelitian yang serupa.

Semarang, 15 Februari 2010

Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbit, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 18 Februari 2010

(Marius Masri)
NIM: C4B008018

ABSTRACT

Local autonomy and fiscal decentralization policies are aimed to reduce fiscal disparity among areas, to provide better and efficient public goods and services, and to make the

government keep in touch with their people. The main instrument of fiscal decentralization policy is fund transfer policy to region that consists of Dana Bagi Daerah (DBD), Dana Alokasi Umum (DAU), and Dana Alokasi Khusus (DAK). Fund transfer to region will influence the APBD.

The local government expenditure changes in form of expansion or contraction will influence the amount of money outstanding and price stabilization. Price stabilization is one of development goals, both nationally and regionally. Price stability is viewed from inflation. Inflation by demand side is caused by government expenditures. This study focused on the effects of local government expenditure on regional inflation in NTT.

The method used in this study is data panel that include twelve Kabupaten/Cities to describe regional inflation behavior. Observation data covers 2001-2008 periods. The data was regressed by fixed effects model (FEM), using Eviews and SPSS software package. This study examines the influences of regional fiscal policy variables namely employees expenditure, operating expenditure, capital expenditure, and fiscal decentralization reform on inflation.

The results show that employees expenditure and operating expenditure have positive and significant influences on inflation at $\alpha = 5\%$, whereas capital expenditure and fiscal decentralization reform has positive and significant influence on inflation at $\alpha = 1\%$. Government expenditure can affect inflation, therefore, the author suggests that government expenditure prioritized on public interests such as capital expenditure and investment that can improve goods and services output to maintain price stability, are used to finance government employees' and operating last for government programs.

Keywords: Inflation, employees' expenditure, operating expenditure, capital expenditure, fiscal decentralization reform

ABSTRAKSI

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara daerah, menyediakan barang dan jasa publik yang lebih baik dan lebih efisien, serta mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Instrumen utama kebijakan desentralisasi fiskal adalah kebijakan transfer dana ke daerah, yang terdiri atas dana perimbangan dan dana otonomi khusus. Dana perimbangan tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Transfer dana ke daerah akan mempengaruhi APBD.

Perubahan belanja pemerintah daerah bersifat ekspasif atau kontraksi mempengaruhi jumlah uang beredar dan stabilitas harga. Stabilitas harga merupakan salah satu sasaran pembangunan, baik secara nasional maupun secara regional. Stabilitas harga dilihat dari

inflasi. Inflasi karena tarikan permintaan disebabkan oleh pengeluaran pemerintah. Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap inflasi regional di Provinsi NTT.

Metode yang digunakan adalah panel data mencakup duabelas Kabupaten/Kota untuk menggambarkan perilaku inflasi regional. Data observasi meliputi periode tahun 2001-2008. Data diregresi dengan menggunakan fixed effects model (FEM), dengan menggunakan alat bantuan software Eviews 6 dan SPSS 17. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis seberapa besar pengaruh variabel-variabel kebijakan fiskal regional yakni belanja pegawai, belanja operasional, belanja modal, dan reformasi desentralisasi fiskal terhadap inflasi.

Hasil perhitungan diperoleh, belanja pegawai dan belanja operasional berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap inflasi, sedangkan belanja modal dan dummy reformasi desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha 1\%$ terhadap inflasi. Belanja pemerintah dapat mempengaruhi inflasi, sehingga peneliti menyarankan agar belanja pemerintah diprioritaskan untuk kepentingan publik seperti belanja modal atau investasi karena dapat meningkatkan output barang dan jasa sehingga dapat menjaga stabilitas harga. Sedangkan belanja pegawai dan belanja operasional digunakan untuk kepentingan operasional kegiatan dan program pemerintah.

Kata kunci: inflasi, belanja pegawai, belanja operasional, belanja modal, dan reformasi desentralisasi fiskal.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat, petunjuk, kasih, dan pertolongan-NYA, sehingga tesis ini dapat rampung. Penulisan tesis ini disadari melalui proses yang tidak luput dari berbagai kendala atau hambatan. Semua itu menjadi pengalaman berharga bagi penulis, dalam mengakhiri jenjang pendidikan studi S2 di UNDIP Semarang. Namun berbagai bantuan semua pihak, baik saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini penulis ucapkan limpah terima kasih.

Lembaran ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada;

7. Bapak Drs. Wiratno, MEd selaku pembimbing utama, dan Bapak Maruto Umar Basuki, MEd selaku pembimbing pendamping, atas kesabaran dan kesediaannya dalam membimbing penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen Program MIESP Studi UNDIP, yang telah memberikan berkah ilmu kepada penulis, dan seluruh staf Administrasi Program Studi MIESP UNDIP, yang telah memberikan pelayanan selama ini.
9. Pimpinan Yapenkar Kupang dan Rektor UNIKA Widya Mandira Kupang, yang memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan S2.
10. Orang tua tercinta, Alm Bpk Silivester Prins Sadipun dan Mama Maria Natalia Idong, yang telah membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis dengan kasih sayang, dari lubuk hati terdalam penulis persembahkan terimah kasih tak terhingga dan penghargaan yang tulus atas kebaikan mereka. Tak lupa penulis ucapkan terimah kasih dan penghargaan kepada adik-adikKu tercinta, Sisilia Florida Leonid Sadipun, Maria Erni Sadipun, dan Ipar David Daud Jeradu beserta ponaanKu Glen, dan Rosa, atas doa dukungannya.
11. Istri Tersayang Yuliana Senu Sadipun, yang mengijikan dan mendukung suami tercinta dalam doa, untuk menggapai cita-cita, dalam menyelesaikan pendidikan S2. Tak lupa juga ucapan terimah kasih dan penghargaan kepada mertua alm Bpk. Yakobus Paro dan Mama Wilhemian atas doanya.
12. Teman-teman, Pak Zul, Pak Aan, Pak Yohan, Ibu Maal, Ibu Lala, Ibu Seri, Ibu Frida, Mba Rati, Mba Lira, singkatnya teman-teman angkatan XIV Program Studi MIESP UNDIP, penulis ucapkan terimah kasih atas kebaikan semoga Tuhan memberkati kita semua.

Akhirnya penulis menyadari bawah, tesis ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, yang tentunya menjadi tanggungjawab penulis dan selanjutnya diperbaiki untuk penelitian yang serupa.

Semarang, 15 Februari 2010

Penulis

(Marius Masri)
NIM: C4B008018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latarbelakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
TEORITIS	11
2.1 Tinjauan Pustaka.....	11
2.1.1 Reformasi Desentralisasi Fiskal	13
2.1.2 Hubungan APBN dan APBD.....	15
2.1.3 Struktur APBD	17

2.1.4	Kebijakan Fiskal.....	21
2.1.5	Teori Produksi.....	23
2.1.6	Teori Kuantitas Uang.....	24
2.1.7	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi Regional.....	29
2.1.7.1	Inflasi karena Tarikan Permintaan.....	29
2.1.7.2	Inflasi karena Dorongan Penawaran.....	33
2.1.7.3	Inflasi Struktural.....	35
2.2	Penelitian Terdahulu.....	35
2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	42
2.4	Hipotesis.....	44
BAB III	METODE PENELITIAN.....	46
3.1.	Definisi Operasional Variabel.....	46
3.2.	Metode Pengumpulan Data.....	48
3.3	Populasi dan Sampel.....	48
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	49
3.5	Metode Analisis.....	50
3.5.1.	Model Regresi Data Panel.....	52
3.5.2.	Model Penelitian.....	51
3.5.3.	Pengujian Asumsi Model Klasik.....	54
3.5.4.	Pengujian Kriteria Statistik.....	57
3.5.4.1.	Koefisien Determinasi <i>Goodness of fit test</i> (R^2).....	58
3.5.4.2.	Pengujian Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F).....	59
3.5.4.3.	Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t).....	60
BAB IV	GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN.....	62
4.1	Kondisi Umum.....	62
4.1.1	Geografis.....	62
4.1.2	Topografi.....	63
4.1.3	Klimatologi.....	64
4.2	Keadaan Perekonomian.....	65
4.3	Penduduk dan Angkatan Kerja.....	66
4.4	Perkembangan Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.....	67
4.5.	Perkembangan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.....	69

BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	74
5.1.	Analisis Data.....	74
5.1.1	Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik.....	75
5.1.2	Analisis Hasil Regresi.....	79
5.1.3	Pengujian Hipotesis.....	82
5.2	Pembahasan	83
BAB VI	PENUTUP.....	86
6.1	Kesimpulan.....	86
6.2	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penerimaan APBD Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (000.000 Rupiah).....	6
Tabel 1.2 Belanja APBD Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (000.000 Rupiah).....	8
Tabel 2.1 Perbandingan Beberapa Konsep dalam UU No.22 Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No.5 Tahun 1979.....	14
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 4 Penduduk Propinsi NTT Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Seminggu Yang Lalu Tahun 2008.....	67
Tabel 5.1 Ringkasan Hasil Regesi.....	75
Tabel 5.2 Uji Multikolinearitas.....	76
Tabel 5.3 Uji Autokorelasi DW.....	77
Tabel 5.4 Uji Heteroskedastisitas.....	77
Tabel 5.5 Uji Normalitas.....	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Inflasi Provinsi NTT (1970-2008).....	3

Gambar 1.2	Inflasi Provinsi di Indonesia Era Otonomi Daerah (2000-2007).....	5
Gambar 2.1	Aliran Penerimaan Dalam Negeri Ke Dana Perimbangan.....	16
Gambar 2.2	Anatomi APBD.....	17
Gambar 2.3	Demand Pull Inflation.....	30
Gambar 2.4	Alur Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal.....	31
Gambar 2.5	Cost Push Inflation.....	33
Gambar 2.6	Bagan Kerangka Pemikiran Teoritis.....	42
Gambar 3	Aturan Membandingkan Uji Durbin-Watson dengan Tabel Durbin-Watson.....	55
Gambar 4.1	Perkembangan Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi NTT periode 2001 - 2008	68
Gambar 4.2	Perkembangan Belanja Pegawai Kabuapate/Kota di Provinsi NTT Periode 2001 – 2008.....	69
Gambar 4.3	Perkembangan Belanja Operasional Kabuapate/Kota di Provinsi NTT Periode 2001 – 2008.....	71
Gambar 4.4	Perkembangan Belanja Modal Kabuapate/Kota di Provinsi NTT Periode 2001 – 2008.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman	
Lampiran 1	Data Belanja Pegawai, Belanja Operasional, Belanja Modal, Dummy Reformasi Desentralisasi Fiskal, dan Inflasi Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur (Periode 2001-2008).....	91
Lampiran 2	Data Mentah.....	97
Lampiran 3	Regresi Utama Eviews 6.....	101

Lampiran 4	Uji Multikolinieritas (1).....	102
Lampiran 5	Uji Multikolinieritas (2).....	103
Lampiran 6	Uji Multikolinieritas (3).....	104
Lampiran 7	Uji Multikolinieritas (4).....	105
Lampiran 8	Uji Autokorelasi Durbin-Watson (DW).....	106
Lampiran 9	Uji Heteroskedastisitas.....	107
Lampiran 10	Uji Normalitas.....	108
Lampiran 11	Regresi Utama, dengan SPSS 17.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang

Reformasi Negara kita telah merambah ke seluruh aspek kehidupan. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Salah satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan yang dimaksud adalah aspek hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Pada aspek ini isu yang mencuat adalah adanya tuntutan otonomi yang lebih luas dan nyata yang harus diberikan kepada daerah. Sejak per 1 Januari 2001 Bangsa dan Negara Indonesia memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah dilaksanakan di seluruh Dati II (Kota dan Kabupaten). Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI. Menurut *United Nation Development Program (UNDP)* bentuk-bentuk desentralisasi dalam era otonomi daerah meliputi; desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal, desentralisasi politik, dan desentralisasi pelayanan.

Desentralisasi fiskal menjadi salah satu bentuk desentralisasi yang paling banyak disoroti dan paling berpengaruh terhadap perkembangan daerah dan merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi daerah. Kebijakan fiskal pada dasarnya alat atau instrumen pemerintah yang sangat penting peranannya dalam sistem perekonomian. Instrumen fiskal itu berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga atau mengendalikan inflasi, memperluas basis kegiatan ekonomi berbagai sektor, dan secara khusus memperluas lapangan usaha untuk menurunkan tingkat pengangguran.

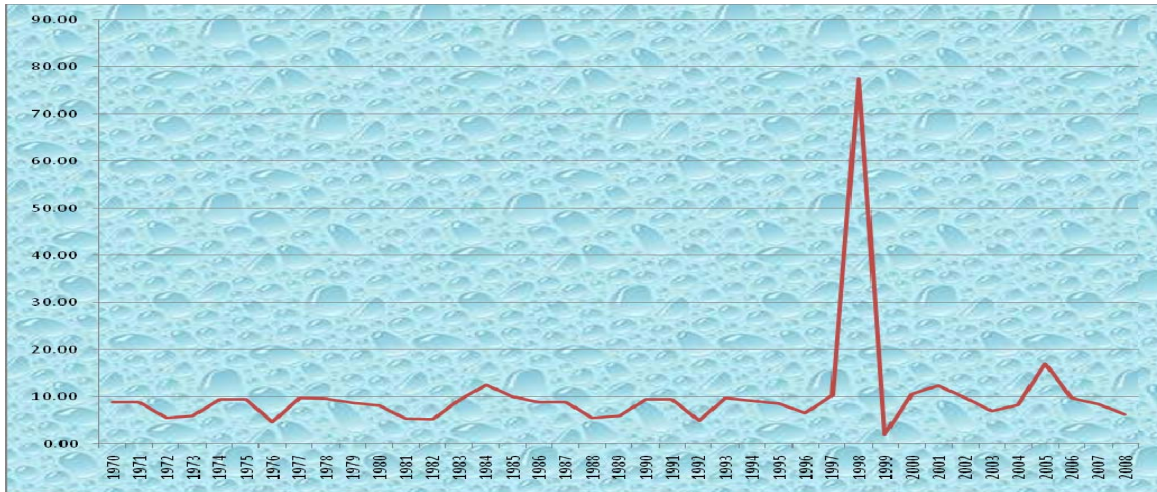
Tujuan desentralisasi fiskal adalah (i) untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara daerah (ii) menyediakan barang dan jasa publik yang lebih baik dan lebih efisien, dan (iii) mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Tujuan ini sulit dicapai mengingat kedua UU otonomi daerah, UU No 22/1999 dan UU No 25/1999, dirancang oleh dua lembaga yang berbeda sehingga banyak sekali terjadi ketidakjelasan dan tumpang tindih. Ketidakjelasan bersumber dari tiga unsur penting, yaitu (i) perhatian pemerintah lebih ditekankan pada sisi penerimaan; (ii) pendelegasian ke pemerintah daerah lebih ditekankan kepada kemampuan daerah masing-masing; dan (iii) pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah proaktif untuk menspesifikasi kewenangan mereka secara terperinci. Perubahan kedua UU otonomi daerah, yakni perubahan atau reformasi UU No.22/1999 menjadi UU No.32/2004, tentang Pemerintah Daerah, dan UU No.25/1999 menjadi UU No.33/2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tersebut mencakup (i) membuat kejelasan kewenangan pemerintah daerah (tugas-tugas pengeluaran) secara lebih baik; (ii) meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan konstruktif; dan (iii) tugas-tugas penerimaan perlu lebih dispesifikasikan antara pemerintah kota/kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. (Abimanyu *et.al*, 2009)

Reformasi terhadap hak dan kewajiban dalam pemerintah daerah serta pengaturan terhadap penerimaan dan pengeluaran APBD, berdampak pada proporsi aliran dana perimbangan meningkat, selanjutnya berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah baik untuk konsumsi dan investasi, berdampak pada output, dan stabilitas harga atau inflasi terkontrol.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang dimaksudkan dengan

kondisi yang lebih baik adalah meningkatkan output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga (inflasi terkontrol).

Gambar 1.1
Inflasi Provinsi NTT (1970 – 2008)



Sumber; SEKI BI, SEKDA BI dan BPS Indonesia. Data diolah

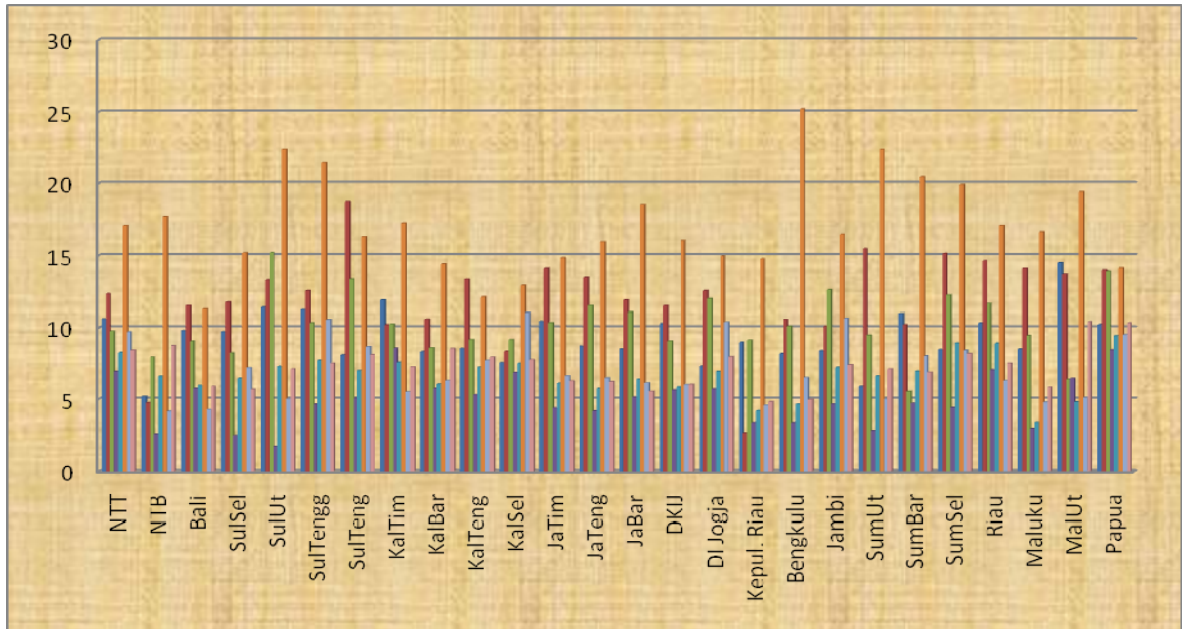
Sejak undang-undang otonomi daerah ditetapkan tahun 1999 dan mulai berjalan efektif pada tahun 2001, laju inflasi mencapai rata-rata 10,15% menempati rengking ketuju nasional dengan tingkat inflasi di atas dua digit, (lihat Gambar 1.1). Inflasi tinggi menggambarkan ketidak stabilan harga, produksi atau PDRB rendah, ketergantungan pada produksi daerah lain tinggi, industrialisasi belum berkembang, kondisi pertanian sangat tergantung pada kesuburan tanah dan faktor cuaca, bukan skala agrobisnis atau pertanian belum bersifat agrobisnis, ekspor barang mentah. Ketergantungan pada produksi daerah lain, akan memberikan keuntungan bagi provinsi lain yang menjadi sumber produksi barang kebutuhan, belum dikembangkan dan dilestarikan keunggulan lokal yang dimiliki, menjadikan daerah ini unggul dalam potensi tapi kalah dalam produksi, seterusnya menjadi pengimpor abadi terhadap barang yang dapat dihasilkan sendiri, dan berkembang pada kehidupan daerah, yang dapat mensejahterakan daerah lain bukan daerahnya sendiri, serta menjadi tempat pemasaran produksi barang bagi daerah lain yang sentral industri manufaktur telah berkembang pesat.

Keunggulan lokal yang dimiliki provinsi ini adalah penghasil ternak besar berskala nasional, jagung dan bahkan dijuluki gudang ternak nasional karena potensi daerah yang sabana, serta dipadukan dengan berbagai program yang dicanakan tetapi hasilnya tidak berkelanjutan, sehingga provinsi ini bukan lagi menjadi gudang ternak, bahkan kandangpun telah tiada, yang terjadi sekarang ketergantungan pada produksi provinsi lain, sehingga kelebihan permintaan dan kekurangan penawaran harus dipenuhi dari daerah lain.

Kelebihan permintaan dan rendahnya produksi lokal karena pemanfaatan dana oleh pemegang kebijakan tidak berorientasi pada investasi yang mendorong produksi barang tetapi berorientasi pada pengeluaran konsumsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa kepada masyarakat, serta meninggalkan pengeluaran investasi untuk pengembangan potensi, dalam mempertahankan keunggulan lokal.

Laju inflasi dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Indonesia barat khususnya wilayah pulau Jawa, provinsi NTT menempati urutan pertama, dan dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Indonesia bagian tengah khususnya provinsi-provinsi di wilayah Nusa Tenggara, menempati laju inflasi urutan paling atas, serta dibandingkan dengan provinsi-provinsi Indonesia wilayah timur, provinsi NTT menempati urutan kedua setelah provinsi Papua. Secara nasional laju inflasi di provinsi NTT tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah, sehingga dapat menggambarkan ketidak stabilan harga ditingkat regional. (lihat Gambar 1.2).

Gambar 1.2
Inflasi Provinsi di Indonesia Era Otonomi Daerah (2000-2007)



Sumber; SEKI BI, SEKDA BI dan BPS Indonesia. Data diolah

Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan fiskal ekspansif atau kontraksi terlihat dari penerimaan dan pengeluaran APBD. Pendapatan daerah yang tercantum dalam APBD adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD, merupakan nilai output daerah yang telah dikurangi dengan pajak atau retribusi daerah. Pendapatan daerah rendah berarti output atau PDRB rendah, sebaliknya pendapatan daerah naik artinya output daerah tinggi.

Tabel 1.1
Penerimaan APBD Seluruh Kabupaten/Kota
di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Rp. 000.000)

No	Komponen	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
A	Penerimaan (Rp. 000.000)					
1	PAD	316.986	209.789	351.467	412.874	410.183
2	Dana Perimbangan	3.877.767	3.524.162	3.948.303	5.402.777	5.533.058
3	Lain-lain Pendapatan	474.969	218.134	179.417	36.317	218.576
	Total Penerimaan	4.669.722	3.952.086	4.479.188	5.851.969	6.161.818
B	Kontribusi (%)					

1	PAD	6.79	5.31	7.85	7.06	6.66
2	Dana Perimbangan	83.04	89.17	88.15	92.32	89.80
3	Lain-lain Pendapatan	10.17	5.52	4.01	0.62	3.55

Sumber data; Biro SEKDA NTT, tahun 2008

Sejak otonomi daerah ditetapkan, kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di NTT, berada di bawah 10% dari APBD (lihat Tabel 1.1) Keadaan ini menunjukkan output daerah rendah, efek desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan tidak memberikan manfaat berarti, terjadi hanya kualitas pelayanan pemerintah membaik, tetapi pengembangan potensi dan keunggulan lokal sebagai sumber penerimaan tidak tercapai.

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Sumber penerimaan APBD adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan sah. Penerimaan daerah terbesar seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, berasal dari dana perimbangan yakni di atas 85% dari APBD (lihat Tabel 1.1). Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Alokasi dana perimbangan terhadap APBD, berdampak positif bagi daerah karena dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan produksi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran pemerintah daerah bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah, sesuai dengan tujuan desentralisasi fiskal. Perubahan positif belanja pemerintah dari tahun sebelumnya berarti pemerintah daerah melaksanakan kebijakan fiskal ekspansif akan meningkatkan permintaan, sebaliknya perubahan negatif pengeluaran pemerintah daerah artinya pemerintah daerah melaksanakan kebijakan fiskal kontraksi akan menurunkan permintaan.

Belanja daerah yang tercantum dalam APBD adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Anggaran

belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang provinsi atau kabupaten/kota, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Komponen pengeluaran APBD terdiri atas dua, yakni pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi. Pengeluaran konsumsi pemerintah adalah berbagai jenis belanja pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaat kurang dari dua belas bulan, dan pengeluaran investasi pemerintah adalah berbagai jenis belanja pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, yang digunakan untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan.

Tabel 1.2
Belanja APBD Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Rp. 000.000)

No	Klasifikasi	2003	2004	2005	2006	2007
A	Pengeluaran Konsumsi	3.452.023	3.325.903	3.552.408	4.091.165	4.835.370
1	Belanja Pegawai	2.074.811	2.010.808	2.089.711	2.258.514	2.653.259
2	Belanja Operasional/barang dan jasa	1.377.212	1.315.095	1.462.697	1.832.651	2.182.111
A	Belanja Barang dan Jasa	514.050	498.253	595.537	765.698	904.917
B	Belanja Perjalanan Dinas	227.033	199.997	231.128	311.165	375.178
C	Belanja Pemeliharaan	295.212	229.639	233.618	263.606	312.432
D	Belanja lain-lain/ Bantuan Sosial	307.045	364.673	366.283	409.110	497.285
E	Pengeluaran tdk Termasuk Bagian Lain	33.872	22.533	36.131	83.072	92.299
B	Pengeluaran Investasi	866.428	791.485	753.465	1.282.107	1.484.311
3	Belanja Modal/ Pembangunan	866.428	791.485	753.465	1.282.107	1.484.311
Total		4.318.451	4.117.388	4.305.873	5.373.272	6.319.681

Sumber; Biro SEKDA NTT, Data diolah (2009)

Pengeluaran konsumsi pemerintah daerah lebih besar dari pengeluaran investasi, dimana menempatkan belanja operasional dan belanja pegawai sebagai belanja pemerintah daerah terbesar, sedangkan belanja modal menempati urutan terakhir (lihat Tabel 1.2).

1.2. Perumusan Masalah

Penelitian ini dilandasi oleh ketidak stabilan harga, yang menyebabkan inflasi tinggi di Provinsi NTT. Keseimbangan tidak tercapai antara permintaan barang dan jasa (jumlah konsumsi, investasi, dan pembelian pemerintah) dan penawaran barang dan jasa (tingkat produksi) di daerah menyebabkan ketidak stabilan harga. Inflasi karena tarikan permintaan (*demand pull inflation*) yang disebabkan oleh pengeluaran atau belanja pemerintah daerah. Sala satu faktor penyebab adalah reformasi kebijakan desentralisasi fiskal, sehingga terjadi perubahan penerimaan pemerintah daerah yang bersumber dari dana perimbangan. Perubahan kedua undang-undang otonomi daerah, di mana sebelum reformasi desentralisasi fiskal pengeluaran pemerintah daerah relatif rendah dibandingkan sesudah reformasi desentralisasi fiskal, artinya ada peningkatan aliran dana masuk ke daerah (*capital inflow*) menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar (JUB) yang berpotensi terjadinya perubahan harga atau inflasi.

Uraian di atas, terdapat permasalahan yang terjadi diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan diidentifikasi serta diterjemahkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah variabel-variabel kebijakan fiskal regional dari sisi pengeluaran yakni belanja pegawai, belanja operasional, belanja modal, dan reformasi desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inflasi, di Provinsi NTT ?
- b. Faktor apakah yang paling dominan menyebabkan inflasi, di Provinsi NTT ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Mengacu pada latarbelakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Menganalisis variabel-variabel kebijakan fiskal regional dari sisi pengeluaran yakni belanja pegawai, belanja operasional, belanja modal, dan reformasi desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inflasi, di Provinsi NTT?

b. Menguji faktor yang paling dominan menyebabkan inflasi, di Provinsi NTT.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah;

a) Sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan pemerintah daerah, yang terarah dan tidak menimbulkan masalah baru bagi pembangunan daerah, dalam mengantisipasi inflasi regional dengan memperhatikan variabel-variabel kebijakan fiskal regional dari sisi pengeluaran yakni belanja pegawai, belanja operasional, dan belanja modal.

b) Untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan inflasi regional dengan menambah dan memperbanyak pengamatan terhadap variabel kebijakan fiskal regional dan variabel lainya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Pustaka

Riset ini mengacu pada ketidak stabilan harga yang menimbulkan inflasi. Inflasi karena tarikan permintaan (*demand pull inflation*) yang disebabkan oleh pengeluaran pemerintah daerah, maka model yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah model teori produksi dan model teori kuantitas uang. Teori produksi berkisar pada fungsi produksi yang menghubungkan antara faktor produksi sebagai masukan (inputs) dan hasil produksinya atau produk (*ouputs*). Teori kuantitas uang yang mempengaruhi perekonomian dalam jangka panjang. Teori kuantitas uang (*quantity theory of money*) dikaitkan dengan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap harga.

Pengeluaran pemerintah daerah mempengaruhi inflasi atau harga, dikaitkan dengan teori produksi dan teori kuantitas uang. Teori produksi berkaitan dengan fungsi produksi $Y = f(L, K)$, dimana $Y =$ output, $L =$ tenaga kerja, dan $K =$ modal. Belanja pegawai dan belanja operasional merupakan pengeluaran konsumsi yang menghasilkan output berupa jasa, maka $Y_{\text{jasa}} = f(L)$, sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran investasi yang menghasilkan output berupa barang, maka $Y_{\text{barang}} = f(K)$. Pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah daerah menghasilkan barang dan jasa, maka $Y_{\text{barang dan jasa}} = f(L, K)$, dalam jangka panjang memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB.

Teori kuantitas uang, dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap harga, dengan persamaan $MV = PT$. T diganti dengan Y , di mana Transaksi (T) dan output (Y) sangat berkaitan, karena semakin banyak perekonomian memproduksi, semakin banyak barang dibeli dan dijual, namun keduanya tidak sama, akan tetapi nilai uang dari transaksi adalah proporsional terhadap nilai uang dari

output, maka $MV = PY$. Jika Y menyatakan jumlah output dan P menyatakan harga satu unit output, maka nilai uang dari output adalah PY . Kalau dihubungkan dalam pos pendapatan regional, maka $Y = \text{PDRB riil}$, $P = \text{deflator PDRB}$ dan $PY = \text{PDRB nominal}$. Keseimbangan uang riil $(M/P)^d$ harus sama dengan jumlah uang beredar, maka $P = M/Y$. Asumsi jumlah uang beredar $(M) = \text{belanja pemerintah } (G) = \text{nilai uang dari output } (PY) = \text{PDRB nominal}$, sehingga $P = f(G)$.

Teori ini menjelaskan apa yang terjadi ketika bank sentral mengubah jumlah uang beredar, karena perputaran (V) adalah tetap, setiap perubahan dalam jumlah uang beredar menyebabkan perubahan proporsional dalam PDRB nominal. Karena faktor-faktor produksi dan fungsi produksi sudah menentukan PDRB riil, maka perubahan PDRB nominal harus mencerminkan perubahan tingkat harga. Jadi, teori kuantitas menunjukkan bahwa tingkat harga adalah proporsional terhadap jumlah uang beredar atau $P = M/Y$.

Perubahan pengeluaran pemerintah, menyebabkan perubahan pendapatan, besarnya perubahan pendapatan dilihat dari pengganda pengeluaran pemerintah (*government multiplier*) $\Delta Y/\Delta G = 1/(1-b)$. Perubahan pengeluaran pemerintah mempengaruhi jumlah uang beredar (JUB), pendapatan dan harga karena perubahan permintaan. Dampak perubahan pengeluaran pemerintah daerah jangka panjang terlihat dari perubahan PDRB, jumlah uang beredar dan pendapatan perkapita, selanjutnya mempengaruhi harga akibat perubahan permintaan.

Penelitian ini juga memasukan variabel eksogen yakni *dummy* reformasi desentralisasi fiskal mempengaruhi inflasi regional. Perubahan terhadap kedua undang-undang otonomi daerah yakni sebelum reformasi desentralisasi fiskal pengeluaran pemerintah daerah elatif rendah dibandingkan sesudahnya, karena pengaruh proporsi aliran dana perimbangan naik, selanjutnya berpengaruh terhadap APBD menyebabkan belanja pemerintah daerah naik,

mendorong PDRB naik mendorong jumlah uang beredar naik, menyebabkan pendapatan dan harga naik karena permintaan naik.

2.1.1. Reformasi Desentralisasi Fiskal

Menurut Abimanyu *et.al* (2009) tujuan desentralisasi fiskal adalah (i) untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara daerah (ii) menyediakan barang dan jasa public yang lebih baik dan lebih efisien, dan (iii) mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Tujuan ini sulit dicapai mengingat dua UU otonomi daerah, UU No 22/1999 dan UU No 25/1999, dirancang oleh dua lembaga yang berbeda sehingga banyak sekali terjadi ketidakjelasan. Ketidakjelasan dan tumpang tindih bersumber dari tiga unsur penting, yaitu (i) perhatian pemerintah lebih ditekankan pada sisi penerimaan; (ii) pendelegasian ke pemerintah daerah lebih ditekankan kepada kemampuan daerah masing-masing; dan (iii) pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah proaktif untuk menspesifikasi kewenangan mereka secara terperinci. Agenda perubahan kedua UU Otonomi Daerah tersebut mencakup tiga hal yakni; (i) membuat kejelasan kewenangan pemerintah daerah (tugas-tugas pengeluaran) secara lebih baik; (ii) meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan konstruktif; dan (iii) tugas-tugas penerimaan perlu lebih dispesifikasikan antara pemerintah kota dan kabupaten, propinsi, dan pemerintah pusat.

Menurut Kuncoro (2009) perbedaan konsep dari reformasi UU OTDA, berikut;

Tabel 2.1
Perbandingan Beberapa Konsep dalam UU No.22 Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No.5 Tahun 1979

Istilah	UU No.5/1975 UU No.5/1979	UU No. 22/1999	UU No.32/2004
Desentralisasi	Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya	Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI	Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI

Dekosen trasi	Perlimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat daerah	Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah dan /atau perengkat pusat di daerah.	Pelimpahan wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
Tugas Pembantu	Tugas untuk turut serta dalam melakukan urusan pemerintahan yang di tugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan	Penugasan dari pemerintah kepada daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan	Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Sumber; Tim Lopera (2000; 102-102); UU No. 32/2004; Kuncoro (2004)

2.1.2. Hubungan APBN dan APBD

Menurut Kuncoro (2009), dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. UU No.33/2004 pasal 10, dana perimbangan terdiri dari; (1) Dana bagi hasil dari PBB, PPh orang pribadi dan SDA; (2) Dana Alokasi Umum (DAU); (3) Dana Alokasi Khusus (DAK). UU No. 33/2004 menetapkan perubahan terhadap aliran dana dari pemerintah pusat ke daerah.

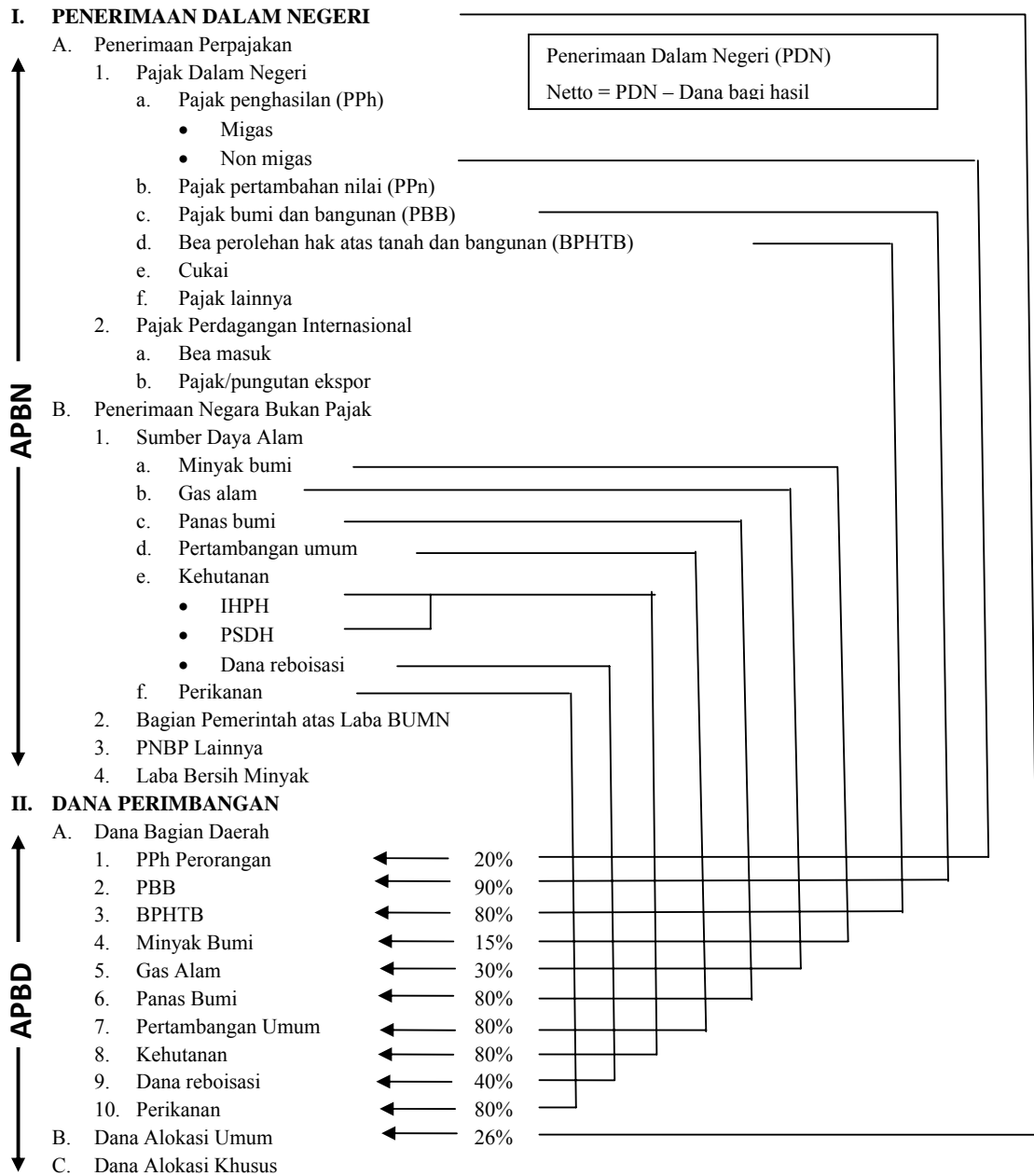
Undang-Undang menjelaskan komponen dana perimbangan tidak mengalami perubahan tetapi terjadi perubahan proporsi aliran dana. Aliran dana penerimaan pemerintah daerah dari dana perimbangan dapat dirangkum dalam Gambar 2.1

Hak yang dimiliki oleh daerah yaitu: (1) hak untuk memungut pajak berdasarkan UU No. 34/2000 tentang pajak dan retribusi daerah; (2) hak untuk mendapatkan dana perimbangan; dan (3) hak untuk melakukan pinjaman. Ketiga hak tersebut merupakan *financial sources* yang dapat digunakan daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya.

Dalam hal konteks kewajiban yaitu; (1) daerah harus dapat mengelola dana tersebut secara sinkron (tidak bertentangan) dengan kebijakan-kebijakan pusat; (2) daerah diharuskan

untuk mengelola dana dengan efisien, efektif, *accountable*, dan transparan; dan (3) daerah harus mempertanggungjawabkan dan melaoporkan penggunaan dana.

Gambar 2.1
Aliran Penerimaan Dalam Negeri Ke Dana Perimbangan



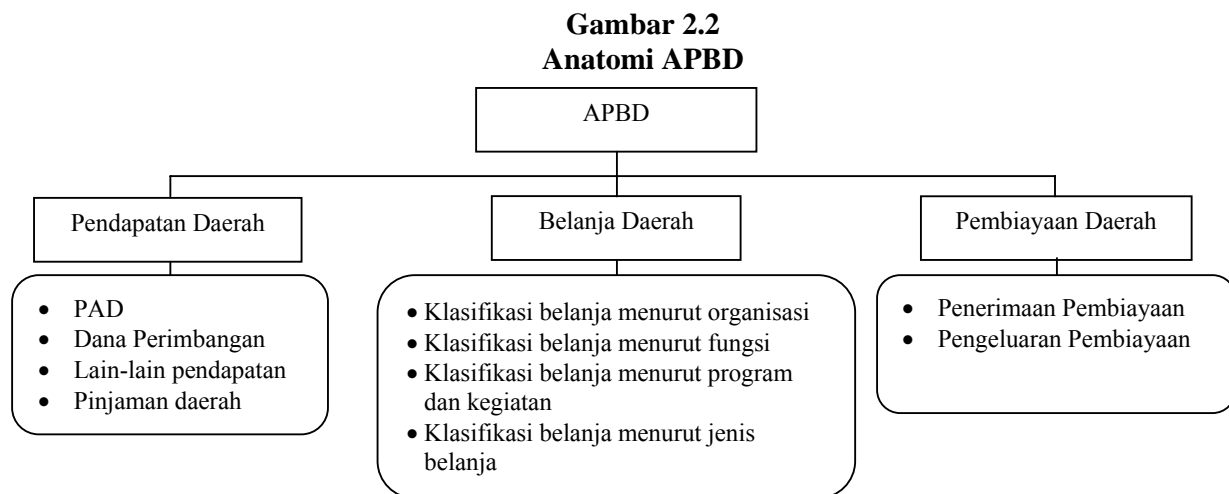
Sumber: Kuncoro (2009)

2.1.3. Struktur APBD

a. Penerimaan APBD

Menurut Basuki (2009), Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pendapatan daerah yang tercantum dalam APBD adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Menurut Kuncoro (2009); Basuki (2009) anatomi APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, (lihat Gambar 2.2). Pendapatan daerah memiliki empat komponen utama yakni PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan, dan pinjaman daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.



Sumber: Yani (2005), dalam Kuncoro (2009)

b. Pengeluaran APBD

Menurut Basuki (2009), pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Belanja daerah yang tercantum dalam APBD adalah semua pengeluaran dari rekening kas

umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Anggaran belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib di prioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan social pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan social. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimaksud diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal yang jelas dan terukur berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Kuncoro (2009); Basuki (2009), belanja daerah diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta klasifikasi menurut kelompok belanja.

Menurut Basuki (2009), belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja;

- (i) **Belanja langsung**; belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan, terdiri;
 - a. Belanja pegawai yang digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - b. Belanja barang dan jasa yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - c. Belanja modal/investasi yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

(ii) **Belanja tak langsung**; merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok biaya tak langsung, dibagi dalam jenis belanja terdiri dari;

- a. Belanja pegawai; merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam pengertian belanja pegawai termasuk uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja bunga; digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang.
- c. Belanja subsidi; digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa layanan umum masyarakat, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- d. Belanja hibah; digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik ditetapkan peruntukannya.
- e. Bantuan sosial; digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
- f. Belanja bagi hasil; digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota

kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- g. Bantuan keuangan; digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- h. Belanja tidak terduga; digunakan untuk menganggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya.

2.1.4. Kebijakan Fiskal

Menurut Rahardja, Manurung (2008); Mankiw (2007); Nanga (2001); Nopirin (2000), kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Menurut Rahardja, Manurung (2008), perbandingan nilai penerimaan (T) dan pengeluaran (G), politik anggaran dapat dibedakan menjadi anggaran tidak berimbang dan anggaran berimbang. Hasil yang dicapai dari kebijakan fiskal merupakan interaksi dari dampak pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap output keseimbangan. Pengaruh perubahan pengeluaran pemerintah terhadap perubahan pendapatan keseimbangan. $\Delta Y = \Delta G / (1-b)$. sedangkan pengaruh pajak terhadap pendapatan, $\Delta Y = b\Delta T / (1-b)$.

a. Anggaran defisit (*deficit budget*)

Anggaran tidak berimbang dapat dibedakan lagi menjadi anggaran defisit dan anggaran surplus. Anggaran defisit adalah anggaran yang direncanakan untuk defisit, sebab pengeluaran yang direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah ($T < G$ atau $G > T$),

politik anggaran defisit, ditempuh bila pemerintah ingin mengstimulir pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan bila perekonomian berada dalam kondisi resesi. Dengan asumsi kondisi awal anggaran pemerintah adalah anggaran berimbang ($G=T$), bila pemerintah menempuh anggaran defisit, maka $\Delta G > \Delta T$, dimana $\Delta G \geq$ dan $\Delta T \geq 0$. Karena $\Delta G > 0$ dan $\Delta G > \Delta T$, maka jika pemerintah menempuh politik anggaran defisit, pemerintah dianggap memiliki kebijakan fiskal ekspasif.

b. Anggaran surplus (*surplus budget*)

Kebalikan dari anggaran defisit, dalam anggaran surplus pemerintah merencanakan penerimaan lebih besar dari pengeluaran ($T > G$ atau $G < T$). Atau dapat juga dikatakan pemerintahan menempuh politik anggaran surplus bila $\Delta C < \Delta T$, dimana ΔG dan $\Delta T \geq 0$. Karena itu juga, politik anggaran surplus sering diidentikan dengan kebijakan fiskal kontraksi. Politik anggaran surplus dilakukan bila perekonomian sedang dalam tahap ekspansif dan terus memanas (*overheating*). Melalui anggaran surplus pemerintah mengerem pengeluarannya untuk menurunkan tekanan permintaan atau mengurangi daya beli dengan menaikkan pajak. Pengaruh anggran surplus terhadap output keseimbangan adalah kebalikan dari pengaruh anggaran defisit.

c. Anggaran berimbang (*balanced budget*)

Pemerintah dikatakan menempuh politik anggaran berimbang bila pengeluaran direncanakan akan dengan penerimaan ($G = T$ dan atau $\Delta G = \Delta T$). tidak ada ketentuan pokok dalam kondisi ekonomi seperti apa politik anggaran berimbang ditempuh. Namun bila pemerintah memiliki politik anggaran berimbang, dua hal yang ingin dicapai adalah peningkatan disiplin dan kepastian anggaran.

2.1.5. Teori Produksi

Menurut Mankiw (2007) teori produksi berkisar pada fungsi produksi yang menghubungkan antara faktor produksi sebagai masukan (inputs) dan hasil produksinya atau produk (ouputs). Ouput barang dan jasa suatu perekonomian GDP bergantung pada (1) jumlah input, yang disebut faktor-faktor produksi, dan (2) kemampuan untuk mengubah input menjadi ouput yang ditujukan dalam fungsi produksi.

a. Faktor produksi

Faktor produksi (*factors of production*) adalah input yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dua faktor produksi penting yaitu modal (M) dan tenaga kerja (L). Modal adalah seperangkat sarana yang digunakan oleh para pekerja; derek para pekerja PNS, kalkulator akuntansi, dan computer PC. Tenaga kerja adalah waktu yang dihabiskan orang untuk bekerja.

b. Fungsi produksi

Fungsi produksi adalah teknologi yang menentukan berapa banyak ouput/ keluaran diproduksi dari jumlah modal dan tenaga kerja tertentu. Para ekonom menggambarkan teknologi yang ada dengan menggunakan faktor produksi (*production function*). Dengan Y menunjukkan output maka fungsi produksi adala;

$$Y = F(K,L) \quad (2.1)$$

Persamaan ini menyatakan bahwa output adalah fungsi dari sejumlah modal dan tenaga kerja. Fungsi produksi mencerminkan teknologi yang digunakan untuk mengubah modal dan tenaga kerja menjadi output. Jika seorang menemukan cara yang lebih baik untuk memproduksi barang, hasilnya lebih banyak output yang diperoleh dari jumlah modal dan tenaga kerja yang sama. Jadi perubahan teknologi mempengaruhi fungsi produksi.

c. Penawaran barang dan jasa

Faktor-faktor produksi dan fungsi produksi bersama-sama menentukan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan, yang sama dengan output perekonomian. secara matematis ditulis;

$$Y = F(\bar{K}, \bar{L}) \quad (2.2)$$

$$= \bar{Y}$$

Penawaran modal serta tenaga kerja dan teknologi adalah tetap, maka output juga tetap. Kenaikan modal dan tenaga kerja serta teknologi produksi menyebabkan pertumbuhan output perekonomian, selanjutnya stabilitas harga.

2.1.6. Teori Kuantitas uang (*Quantity Theory of Money*)

Menurut Mankiw (2007) kuantitas uang mempengaruhi perekonomian dalam jangka panjang. Teori kuantitas uang (*quantity theory of money*) dikaitkan dengan harga dan pendapatan.

a. Transaksi dan persamaan kuantitas (*Transactions Equation*)

Orang memegang uang untuk membeli barang dan jasa. Semakin banyak uang yang mereka butuhkan untuk bertransaksi, maka semakin banyak uang yang mereka pegang. Jadi kuantitas uang dalam perekonomian sangat erat kaitannya dengan jumlah Rupiah yang dipertukarkan dalam transaksi.

Hubungan diantara transaksi dan uang ditunjukkan dengan persamaan berikut, yang disebut persamaan kuantitas (*quantity equation*);

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Uang} & \times & \text{Perputaran} & = & \text{Harga} & \times & \text{Transaksi} \\ M & \times & V & = & P & \times & T \end{array} \quad (2.3)$$

Sisi kanan dari persamaan kuantitas menyatakan transaksi. T menunjukkan total jumlah transaksi selama periode waktu tertentu, katakanlah, setahun. Dengan kata lain, T adalah beberapa kali dalam setahun barang dan jasa dipertukarkan dengan uang. P adalah harga dari suatu transaksi tertentu, jumlah Rupiah yang dipertukarkan. Produk dari harga transaksi dan jumlah transaksi, PT sama dengan jumlah Rupiah yang dipertukarkan dalam setahun.

Sisi kiri persamaan kuantitas menyatakan uang yang digunakan untuk melakukan transaksi. M adalah kuantitas uang. V disebut perputaran uang transaksi (*transactions velocity of money*) dan mengukur tingkat di mana uang bersirkulasi dalam perekonomian. Dengan kata lain, perputaran menyatakan berapa kali uang berpindah tangan dalam periode waktu tertentu. Dengan mengatur kembali persamaan kuantitas, maka bisa menghitung perputaran uang sebagai berikut;

$$V = PT/M \quad (2.4)$$

Persamaan kuantitas ini berguna karena menunjukkan bahwa jika satu dari variabel-variabel itu berubah, maka satu atau lebih variabel lainnya juga berubah untuk menjaga kesamaan. Misalnya, jika kuantitas uang meningkat dan perputaran uang tidak berubah, maka baik harga atau jumlah transaksi harus meningkat.

b. Transaksi menjadi pendapatan

Persamaan pertama mengandung masalah, yaitu jumlah transaksi sulit diukur, untuk memecahkan masalah ini, jumlah transaksi T diganti dengan output total dari perekonomian Y . Transaksi dan output sangat berkaitan, karena semakin banyak perekonomian memproduksi, semakin banyak barang dibeli dan dijual. Namun keduanya tidak sama, akan tetapi nilai uang dari transaksi adalah proporsional terhadap nilai uang dari output.

Jika Y menyatakan jumlah output dan P menyatakan harga satu unit output, maka nilai uang dari output adalah PY . Y adalah GDP riil, P adalah deflator GDP, dan PY adalah GDP nominal. Persamaan kuantitas menjadi

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Uang} & \times & \text{Perputaran} & = & \text{Harga} & \times & \text{Output} \\ M & \times & V & = & P & \times & Y \end{array} \quad (2.5)$$

Karena Y juga merupakan pendapatan total, V dalam persamaan kuantitas versi ini disebut perputaran pendapatan uang (*income velocity of money*). Perputaran pendapatan

uang menyatakan berapa kali uang masuk ke dalam pendapatan seseorang dalam periode waktu tertentu.

c. Fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas

Teori kuantitas uang menunjukkan, kuantitas uang dalam bentuk jumlah barang dan jasa yang bisa dibelinya. Jumlah ini, M/P disebut dengan keseimbangan uang riil (*real money balances*). Fungsi permintaan uang (*money demand function*) adalah persamaan yang menunjukkan kuantitas keseimbangan uang riil yang ditahan orang. $(M/P)^d = kY$,

$$(2.6)$$

dimana k adalah konstanta yang menyatakan beberapa banyak uang yang ingin ditahan orang untuk setiap Rupiah pendapatan. Persamaan ini menyatakan bahwa kuantitas keseimbangan uang riil yang diinginkan adalah proporsional terhadap pendapatan riil. Persamaan kuantitas uang memandang keseimbangan uang riil $(M/P)^d$ harus sama dengan jumlah uang beredar M/P ke dalam fungsi permintaan uang.

$$M/P = kY \quad (2.7)$$

$$\text{Persamaan ini menjadi; } M(1/k) = PY, \quad (2.8)$$

$$\text{Menjadi; } MV = PY. \quad (2.9)$$

dimana $V = 1/k$. menunjukkan kaitan antara permintaan terhadap uang dan perputaran uang. Ketika orang ingin menahan banyak uang untuk setiap Rupiah pendapatan (k adalah besar), uang tidak sering berpindah tangan (V adalah kecil). Sebaliknya ketika orang ingin memegang hanya sedikit uang (k adalah kecil), uang sering berpindah tangan (V adalah besar). Dengan kata lain, parameter uang k dan perputaran uang V adalah dua sisi yang berlawanan dari mata uang yang sama.

d. Asumsi perputaran konstan

Persamaan kuantitas mendefinisikan perputaran V sebagai rasio GDP nominal, PY terhadap kuantitas uang M tetap jika membuat asumsi tambahan bahwa perputaran uang

konstan, maka persamaan kuantitas menjadi sebuah teori dampak uang yang bermanfaat, yang disebut dengan teori kuantitas uang (*quantity theory of money*).

Kita mengasumsikan bahwa perputaran uang adalah konstan, persamaan kuantitas bisa dilihat sebagai teori yang menentukan GDP nominal.

$$M\bar{V} = PY \quad (2.10)$$

Dimana garis diatas V berarti perputaran tetap, karena itu perubahan dalam kuantitas uang (M) harus menyebabkan perubahan yang proporsional dalam GDP nominal (Y), yaitu jika perputaran adalah tetap, kuantitas uang menentukan nilai Rupiah dari output perekonomian.

e. Uang, harga, dan inflasi

Teori menjelaskan dan menentukan seluruh tingkat harga perekonomian, yang memiliki tiga unsur;

1. Faktor-faktor produksi dan fungsi produksi menentukan tingkat output Y.
2. Jumlah uang beredar, M, menentukan nilai output nominal, PY. Kesimpulan ini berasal dari persamaan kuantitas dan asumsi perputaran uang adalah tetap.
3. Tingkat harga P adalah rasio dari nilai nominal output PY terhadap output Y.

Dengan kata lain, kapabilitas produktif dari perekonomian menentukan GDP riil, kuantitas uang menentukan GDP nominal, dan deflator GDP adalah rasio dari GDP nominal terhadap GDP riil.

Teori ini menjelaskan apa yang terjadi ketika bank sentral mengubah jumlah uang beredar, karena perputaran adalah tetap, setiap perubahan dalam jumlah uang beredar menyebabkan perubahan proporsional dalam GDP nominal. Karena faktor-faktor produksi dan fungsi produksi sudah menentukan GDP riil, maka perubahan GDP harus mencerminkan perubahan tingkat harga. Jadi, teori kuantitas menunjukkan bahwa tingkat harga adalah proporsional terhadap jumlah uang beredar.

Karena tingkat inflasi adalah perubahan persentase dalam tingkat harga, teori tingkat harga juga merupakan teori tingkat inflasi. Persamaan kuantitas, ditulis dalam bentuk perubahan presentase, adalah

$$\begin{array}{l} \text{Perubahan \% dalam M +} \\ \text{Perubahan \% dalam V} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Perubahan \% dalam P +} \\ \text{Perubahan \% dalam Y} \end{array}$$

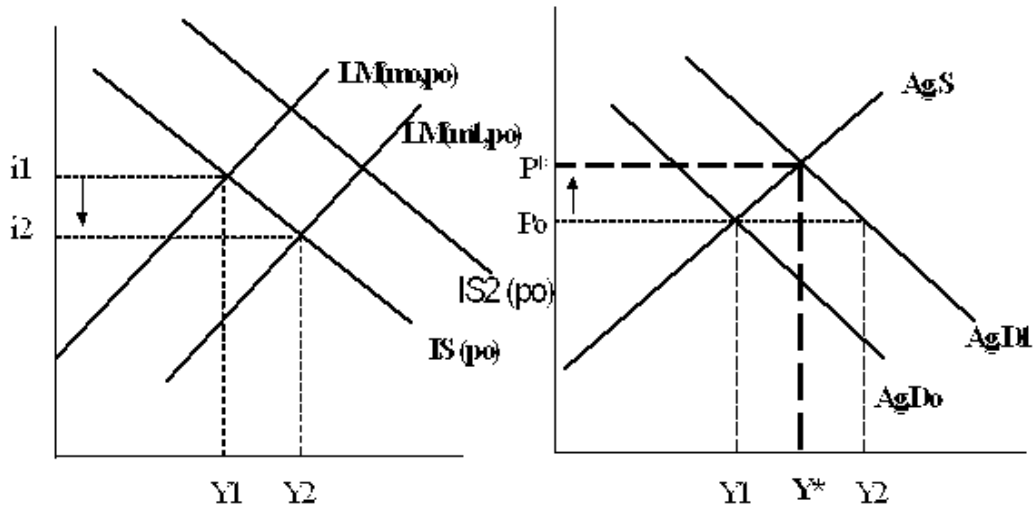
Jadi teori kuantitas uang menyatakan bahwa bank sentral, yang mengawasi jumlah uang beredar, memiliki kendali tertinggi atas tingkat inflasi. Jika bank sentral mempertahankan jumlah uang beredar tetap stabil, tingkat harga akan stabil. Jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat, tingkat harga akan meningkat dengan cepat.

2.1.7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi Regional

2.1.7.1. Inflasi karena Tarikan Permintaan

Menurut Bank Indonesia (2007), Inflasi karena tarikan permintaan (*demand pull inflation*) disebabkan oleh kenaikan permintaan agregat (pengeluaran rumah tangga konsumen, investasi, pengeluaran pemerintah dan sektor luar negeri ekspor minus impor). Secara ringkas, *demand pull inflation* ini dapat dijelaskan dengan menggunakan gambar 2.3. berikut.

Gambar 2.3
Demand Pull Inflation



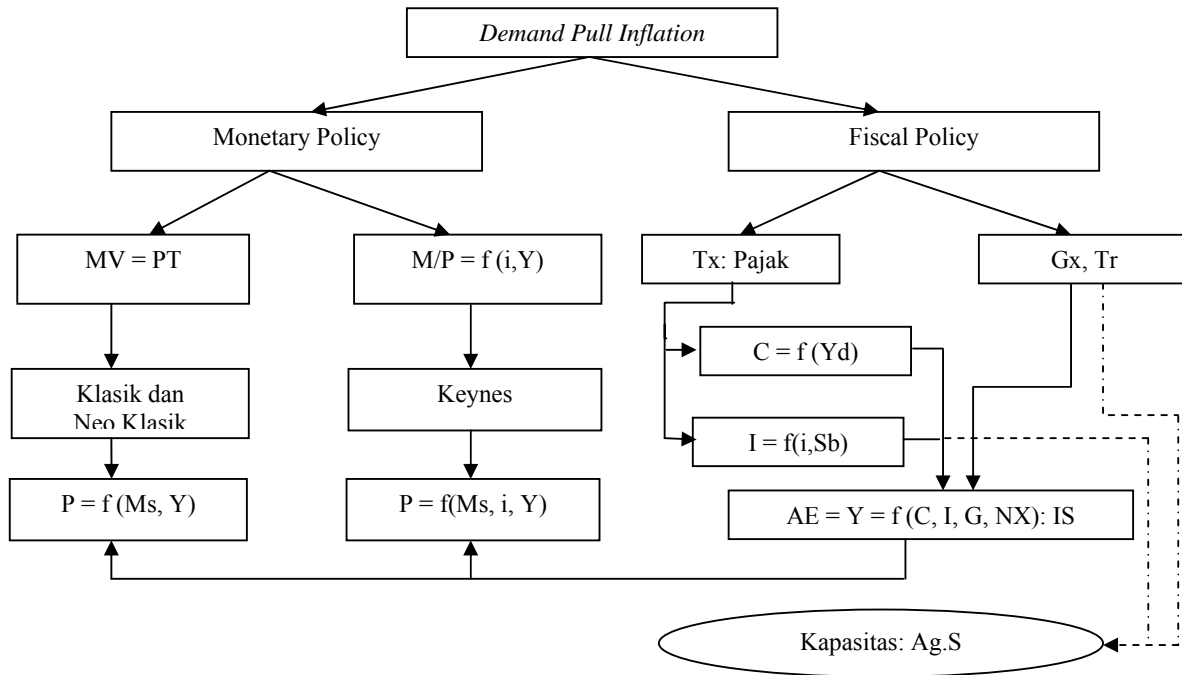
Sumber; BI Semarang, Analisis Perilaku Inflasi Jawa Tengah

Secara implisit, kenaikan kurva LM berarti kenaikan jumlah uang beredar riil. Kenaikan uang beredar riil ini bisa disebabkan oleh karena turunnya tingkat harga sementara uang beredar secara nominal tetap (*Keynes effect*) atau karena adanya ekspansif moneter. Dalam pendekatan kurva IS-LM diasumsikan harga tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu sebab pertama tersebut menjadi kurang relevan dalam pendekatan IS-LM. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kenaikan atau penurunan kurva LM disebabkan oleh ekspansif atau kontraksi moneter. Perubahan besaran moneter ini, yang kemudian melalui mekanisme transmisi akan menyebabkan naiknya permintaan agregat, yang pada gilirannya akan menyebabkan kenaikan tingkat harga atau inflasi (*demand pull inflation*).

Kenaikan kurva IS secara implisit berarti adanya kenaikan pengeluaran agregat, yang pada gilirannya akan menyebabkan naiknya permintaan agregat. Kenaikan kurva IS terjadi karena kenaikan konsumsi masyarakat, kenaikan investasi atau karena ekspansif fiskal maupun penurunan tingkat pajak. Baik kenaikan konsumsi masyarakat maupun investasi akan terjadi karena rangsangan kebijakan fiskal maupun moneter. Rangsangan fiskal itu misalnya penurunan tingkat pajak, atau pembebasan pajak sementara (*tax holiday*) untuk perusahaan. Sementara rangsangan kebijakan moneter bisa berupa penurunan tingkat bunga

kredit; baik kredit modal kerja, kredit investasi ataupun kredit konsumsi. Ekspansif pengeluaran pemerintah melalui APBN/APBD juga akan dapat mendorong naiknya kurva IS, yang akhirnya akan dapat menaikkan kurva permintaan agregat.

Gambar 2.4
Alur Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal



Sumber; BI Semarang, Analisis Perilaku Inflasi Jawa Tengah

Dari telaah atas pendekatan kurva IS-LM tersebut dapat diketahui bahwa kenaikan permintaan agregat dapat disebabkan oleh ekspansi moneter maupun ekspansif fiskal. Gambaran mengenai alur pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tersebut dijelaskan pada Gambar 2.4.

Pada arus kebijakan moneter, dapat diketahui bahwa inflasi (P) dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam besaran uang beredar (Ms) dengan arah yang sama, tingkat bunga (i) dengan arah yang berlawanan, dan pendapatan nasional (Y) dengan arah yang sama. Karena itu pula dapat dikatakan bahwa pengendalian inflasi dari sisi kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengendalikan ketiga variabel tersebut. Walaupun demikian juga harus disadari bahwa dalam perekonomian yang semakin terbuka, ketiga

variabel tersebut tidak sepenuhnya dalam kendali otoritas moneter. Atau dengan kata lain ketiga variabel tidak sepenuhnya sebagai variabel independen.

Dalam suatu perekonomian terbuka, sebagaimana Indonesia, tingkat inflasi tidak sepenuhnya disebabkan oleh perubahan-perubahan variabel domestik, akan tetapi juga oleh perubahan variabel-variabel ekonomi negara lain yang berhubungan dengan Indonesia. Hubungan tersebut berkaitan dengan transaksi di sektor moneter maupun transaksi di sektor barang (riil). Variabel yang mempengaruhi tingkat inflasi Indonesia melalui jalur transaksi moneter atau pasar uang ini antara lain dapat ditelusuri dengan menggunakan pendekatan *International Fisher Effect (IFE)* maupun *International Interest Parity (IIP)*.

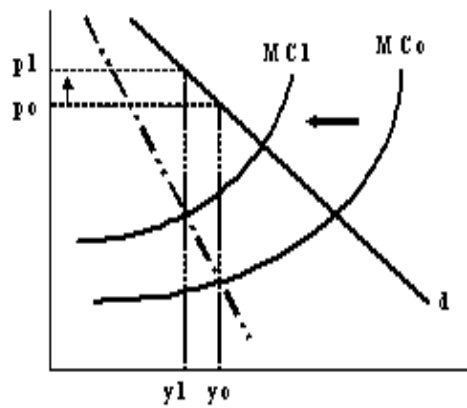
Dalam IFE dijelaskan bahwa ekspektasi selisih tingkat inflasi akan mempengaruhi selisih tingkat bunga. Sementara dalam IIP, ekspektasi kenaikan tingkat bunga, akan menyebabkan kenaikan dalam selisih kurs (depresiasi/apresiasi). Dari hubungan ini dapat diketahui bahwa perubahan kurs mempunyai akan mempengaruhi perubahan tingkat harga atau inflasi.

2.1.7.2. Inflasi karena Dorongan Penawaran

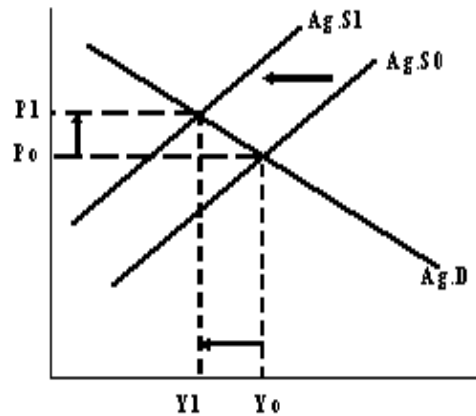
Menurut Bank Indonesia (2007), dari sisi penawaran agregat, inflasi dapat dijelaskan dari aspek dorongan biaya produksi (*cost push*) maupun distorsi distribusi karena struktur pasar yang *monopolitis-oligopolistis*, keduanya akan dapat menghambat penawaran agregat. Hubungan antara tingkat inflasi dengan biaya produksi dan penawaran agregat tersebut dapat ditunjukkan oleh Gambar 2.5

Gambar 2.5 Cost Push Inflation

Gb A. Persh.



Gb B. Perekonomian



Sumber; BI Semarang, Analisis Perilaku Inflasi Jawa Tengah

Gambar 2.5 dapat diketahui bahwa kenaikan ongkos produksi, melalui mekanisme transmisi ongkos, akan dapat menyebabkan penurunan penawaran. Ambil contoh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga BBM; yang merupakan bahan penolong industri, akan menyebabkan ongkos produksi mengalami kenaikan. Dengan naiknya biaya produksi ini, dan industri tidak mau menanggung kerugian akibat kenaikan harga BBM tersebut, industri akan mengkompensasi kenaikan ongkos tersebut kedalam bentuk kenaikan harga pokok produksi dan akhirnya akan menaikkan harga jual produk. Karena struktur industrinya bukan persaingan sempurna, kenaikan harga tersebut sering dilakukan dengan mengurangi produksi atau menghambat distribusi produk ke pasar. Mekanisme yang sama juga akan terjadi apabila terjadi kenaikan ongkos produksi industri manufaktur sebagai akibat apresiasi Dolar AS terhadap Rupiah.

Variabel yang mempengaruhi inflasi dari sisi penawaran ini mencakup variabel-variabel yang mempengaruhi produksi seperti tingkat bunga pinjaman, tingkat upah, harga input utama maupun antara, harga bahan baku, tingkat pajak, tingkat teknologi, jumlah tenaga kerja, dan varibel-variabel lain yang berkaitan dengan produksi. Sementara, struktur pasar

yang oligopolistic-monopolistik akan cenderung menyebabkan distribusi barang menjadi tidak lancar dan karena itu akan dapat menghambat penawaran agregat. Akibatnya, tingkat harga akan dapat mengalami kenaikan.

2.1.7.3. Inflasi Struktural

Menurut Bank Indonesia (2007), inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya berbagai kendala atau kekakuan struktural (*structural rigidities*) yang menyebabkan penawaran dalam perekonomian menjadi kurang atau tidak adanya responsif terhadap permintaan yang meningkat. Contoh inflasi yang disebabkan oleh bencana alam dan peperangan. Kendala ini menyebabkan struktur perekonomian terhambat sehingga penawaran dan permintaan akan barang dan jasa bermasalah dan mempengaruhi harga. Dari telaah atas pendakatan kurva IS-LM tersebut dapat diketahui bahwa kenaikan permintaan agregat dapat disebabkan oleh ekspansif moneter maupun ekspansif fiskal. Alur pengaruh kebijakan moneter dan fiskal, terlihat Gambar 2.4.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian kali ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Pertama, penelitian ini menggunakan obyek daerah, dimana sampel penelitian merupakan daerah Kabupaten/Kota se NTT. Kedua, penelitian ini mendeteksi pengaruh pengeluaran pemerintah daerah (G) terhadap harga/inflasi (P) dengan mengacu pada teori produksi $Y = f(L, K)$ dan teori kuantitas uang $MV = PY$, Jika Y menyatakan jumlah output, dan P menyatakan harga satu unit output, maka nilai uang dari output adalah PY . Kalau dihubungkan dalam pos pendapatan regional, maka $Y = \text{PDRB riil}$, $P = \text{deflator PDRB}$ dan $PY = \text{PDRB nominal}$, sehingga teori ini menjelaskan apa yang terjadi ketika bank sentral

mengubah jumlah uang beredar, karena perputaran (V) adalah tetap, setiap perubahan dalam jumlah uang beredar menyebabkan perubahan proporsional dalam PDRB nominal. Karena faktor-faktor produksi dan fungsi produksi sudah menentukan PDRB riil, maka perubahan PDRB nominal harus mencerminkan perubahan tingkat harga. Jadi, teori kuantitas menunjukkan bahwa tingkat harga adalah proporsional terhadap jumlah uang beredar atau $P = M/Y$. Ketiga penelitian ini memasukkan variabel eksogen kebijakan fiskal regional dari sisi pengeluaran pemerintah daerah, menurut belanja langsung, yakni belanja pegawai, belanja operasional, dan modal/investasi. Keempat, penelitian ini memasukkan variabel *dummy* yakni reformasi desentralisasi fiskal. Kelima, penelitian ini menggunakan variabel inflasi regional, sebagai variabel endogen yang dipengaruhi variabel eksogen yakni belanja pegawai belanja operasional, belanja modal, PDRB atau jumlah uang beredar, dan reformasi desentralisasi fiskal.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Sampel	Model	Hasil Penelitian
1	Priadi Asmanto dan soebagyo (2006)	Analisis pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal regional terhadap harga dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, (periode 1995-2004)	<p>Dependen variabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inflasi • Pertumbuhan ekonomi <p>Independen variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan fiskal regional; (pertumbuhan pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, dan PAD) • Kebijakan moneter; (pertumbuhan dana pihak ketiga/DPK, kredit dan suku bunga riil) • 2 variabel dummy krisis ekonomi dan otonomi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Data <i>time series</i> dari periode 1995-2004 (10 tahun) sedangkan data <i>cross section</i>-nya adalah 25 daerah tingkat dua di Jatim. • Data cross section disesuaikan dengan data kriteria bank Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Model data panel digunakan untuk meregresi secara OLS, dengan pendekatan <i>Fixed effect model (FEM)</i> • Permasalahan yang timbul dalam analisa regresi maka digunakan 2 variabel dummy krisis ekonomi dan otonomi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Periode krisis, inflasi dan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel Pertumbuhan PAD, pengeluaran rutin, DPK dan suku bunga riil. • Periode sebelum otonomi daerah variabel DPK, kredit dan suku bunga mempengaruhi inflasi. Pertumbuhan ekonomi di pengaruhi oleh variable DPK, dan suku bunga. • Periode penerapan otonomi daerah, fenomena inflasi dan pertumbuhan berbeda dengan periode sebelum penerapan otonomi daerah. Inflasi hanya di pengaruhi oleh pertumbuhan pengeluaran rutin dan

						dan suku bunga.
2	Fery Andrianus dan Amelia Niko (2005)	Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dependen</i> Variabel: inflasi • Variabel <i>Independen</i>: jumlah uang yang beredar, PDRB, nilai tukar dan suku bunga 	• Data time series kuartalan 1971;3-2005.2	• Dua model digunakan <i>ordinary least square</i> (OLS) dan partial adjustment model (PAM).	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh tingkat suku bunga sangat berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia selama periode 1997;3-2005;2 dibandingkan dengan nilai tukar
3	Jatno Sunarjo (2002)	Pengaruh faktor moneter terhadap laju inflasi di Indonesia (1994:01-2001:08)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dependen</i> Variabel; Laju Inflasi • <i>Independen</i> Variabel; JUB, Kurs, tingkat suku bunga deposito bank umum, tabungan, kredit disalurkan bank umum dan variable dummy (0 disaat tidak krisis dan 1 disaat krisiss) 	Data <i>time series</i> ; 1994:01 – 2001:08	Model data time series; digunakan untuk meregresi secara OLS	<p>Hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periode sebelum dan saat krisis; kurs, dan jumlah kredit berpengaruh nyata dan positif terhadap laju inflasi; tingkat suku bunga dan tabungan berpengaruh nyata dan negatif terhadap inflasi. • Periode sebelum krisis; JUB berpengaruh nyata dan positif terhadap laju inflasi; kredit berpengaruh nyata dan negatif terhadap laju inflasi • Periode saat krisis; kurs dan kredit berpengaruh nyata dan positif terhadap laju inflasi;

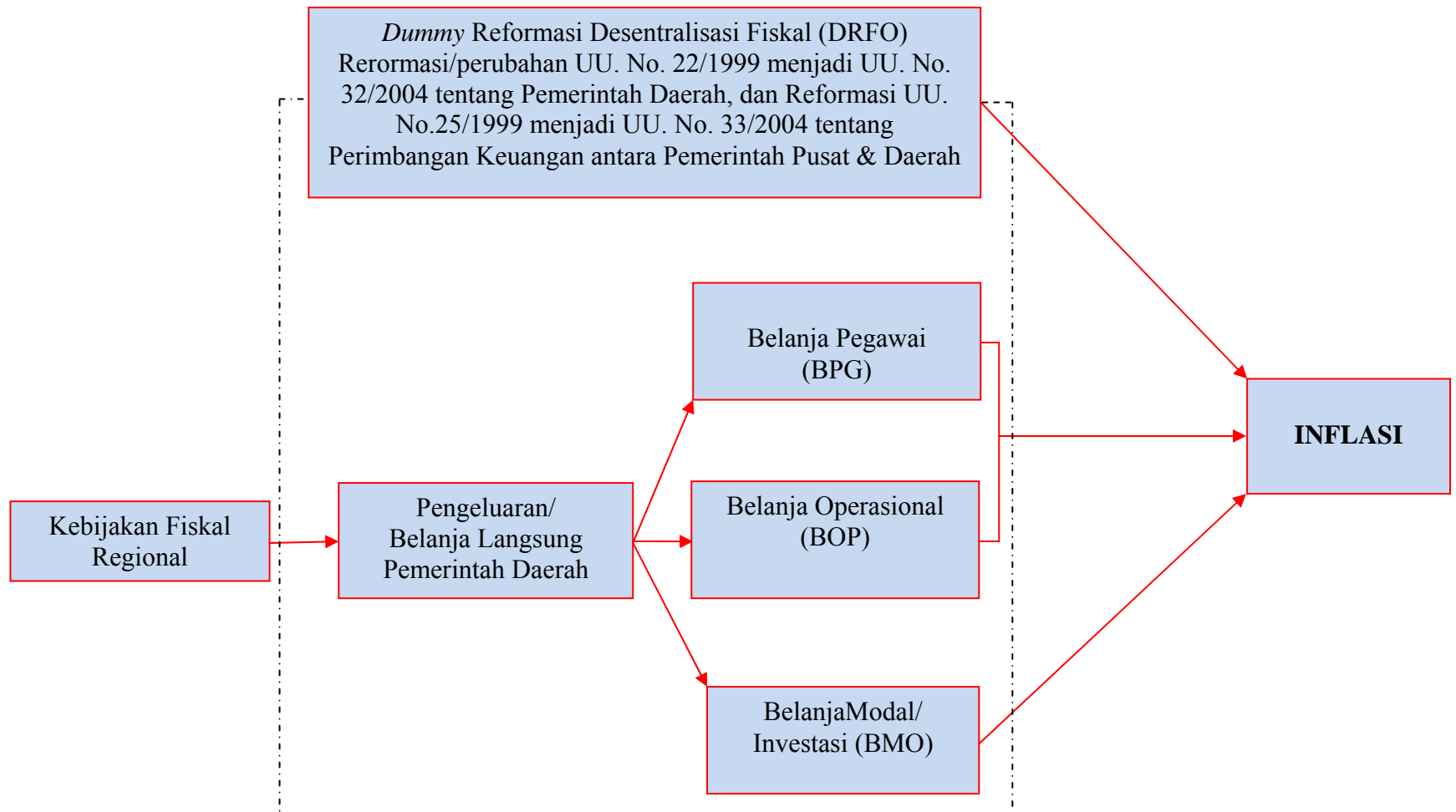
						tingkat suku bunga berpengaruh nyata dan negatif terhadap laju inflasi.
4	Iskandar P. Simorangkir, dkk (2005)	Identifikasi faktor penentu inflasi regional di era otonomi daerah	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dependen</i> Variabel: Inflasi • <i>Independen</i> Variabel: Moneter dan nonmoneter (PAD, pengeluaran rutin dan biaya transportasi) 	Menggunakan sampel 43 kota di Indonesia yang digunakan untuk mengetahui faktor penyebab inflasi regional yang paling dominan, dalam hal ini faktor moneter dan nonmoneter	Model yang digunakan dengan 2 kombinasi; (1) teknik varian decomposition untuk factor penyebab inflasi regional yang paling dominan, dan (2) adalah model data panel untuk mengetahui faktor yang paling menentukan inflasi daerah (faktor moneter dan non moneter)	<ul style="list-style-type: none"> • Secara umum faktor non-moneter memiliki prediktif power yang lebih tinggi dari pada faktor moneter. • Sedangkan untuk faktor yang paling menentukan inflasi di daerah adalah faktor non-moneter yaitu PAD, pengeluaran rutin dan biaya transportasi.
5	Riski Satya Budi dan Frita Amrita (2006)	Stabilitas harga, konvergensi inflasi dan otonomi daerah	Stabilitas harga	Data panel: inflasi 26 propinsi di Indonesia yang digunakan untuk melakukan estimasi tingkat konvergensi inflasi di Indonesia	Teknik analisis dipakai dengan pendekatan teknik data panel yang dikembangkan oleh Levin dan Lin (1992) serta Levin dan Lin (1993), dengan membedakan antara	<ul style="list-style-type: none"> • Inflasi antar daerah di Indonesia tidak menyimpang jauh, tetapi cenderung konvergen. • Sedangkan pada periode otonomi daerah, konvergensi inflasi antara daerah di Indonesia relatif cepat

					periode sebelum dan sesudah penerapan kebijakan otonomi daerah.	bila dibandingkan dengan periode sebelum otonomi daerah.
6	Hery Sulistio Sriwiyanto dan Tetuko Rawidyo Putro (2006)	Tantangan dan prospek implementasi kebijakan stabilitas harga dengan pendekatan model new-keynesian <i>monetary policy</i> dalam perspektif otonomi daerah	Kebijakan stabilitas harga	Empiris membuktikan di 40 kota di Indonesia selama periode 1993 - 2003	<ul style="list-style-type: none"> • Model yang digunakan adalah melalui pendekatan New Keynesian Phillips Curve; • Model tersebut selanjutnya digunakan adalah model E-APC • Model backward-looking Phillips Curve 	<p>Hasil estimasi ditemukan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara umum inflasi yang terjadi di masing-masing daerah selama kurun waktu 1993-1997 ditentukan oleh harapan inflasi serta inflasi inersia. Setelah era reformasi atau kurun waktu 1999-2003 perubahan inflasi selain ditentukan oleh inflasi harapan dan inflasi inersia juga ditentukan oleh kesenjangan output. • Terdapat tingkat signifikan hubungan antara variable perubahan structural yang di penegaruhi oleh perubahan structural dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal. • Peran kebijakan

						desentralisasi berpengaruh terhadap perilaku inflasi daerah. Hasil estimasi dengan regresi, model New-Keynesian secara regional dan secara empiris berlaku dalam ekonomi Indonesia pada periode setelah krisis.
7	Rifai Afin (2006)	Stabilitas dan dispersi harga dalam skema otonomi daerah di Indonesia	Stabilitas harga dan dispersi harga	<ul style="list-style-type: none"> • Data panel dari observasi bulanan terhadap IHK di 43 kabupaten dan kota di Indonesia sebelum otonomi daerah (1998:04 – 1999:12) dan (skema otonomi daerah 2000:01 – 2005:09) 	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik cross sectional untuk melihat konvergensi dan cross regional dispersion untuk melihat pengaruh rata-rata inflasi terhadap standar deviasi setiap periode waktu pada data cross inflation 	<ul style="list-style-type: none"> • Model Dispersi mensyaratkan otoritas moneter untuk melihat bagaimana perilaku dispersi atau sebaran inflasi di daerah sebelum mentargetkan inflasi karena tentu saja akan membawa implikasi negatif jika tidak memperhitungkan adanya perilaku dispersi.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 2.6
Kerangka Pemikiran Teoritis



Riset ini mengacu pada ketidak stabilan harga yang menimbulkan inflasi. Penelitian ini terkendala oleh data, informasi, dan obyek penelitian, maka variabel kebijakan fiskal regional, sebagai variabel yang mempengaruhi inflasi di Provinsi NTT. Kebijakan moneter tidak dimasukkan dalam penelitian ini karena obyek penelitian adalah regional. Inflasi karena tarikan permintaan (*demand pull inflation*) yang disebabkan oleh pengeluaran pemerintah daerah, maka model yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah model teori produksi dan model teori kuantitas uang. Teori produksi berkisar pada fungsi produksi yang menghubungkan antara faktor produksi sebagai masukan (*inputs*) dan hasil produksinya atau produk (*ouputs*). Teori kuantitas uang yang mempengaruhi perekonomian dalam jangka panjang. Teori kuantitas uang (*quantity theory of money*) dikaitkan dengan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap harga. Perubahan pengeluaran pemerintah, menyebabkan perubahan pendapatan, besarnya perubahan pendapatan dilihat dari pengganda pengeluaran pemerintah (*government multiplier*) $\Delta Y/\Delta G = 1/(1-b)$. Perubahan pengeluaran pemerintah mempengaruhi jumlah uang beredar (JUB), pendapatan dan harga karena perubahan permintaan. Dampak perubahan pengeluaran pemerintah daerah terlihat pada PDRB dan pendapatan perkapita selanjutnya mempengaruhi harga akibat perubahan permintaan.

Dalam jangka panjang, perubahan PDRB akibat perubahan pengeluaran pemerintah daerah yakni sebesar $\Delta Y/\Delta G = 1/(1-b)$. Pengeluaran pemerintah daerah naik mendorong PDRB naik sehingga jumlah uang beredar naik, mempengaruhi pendapatan naik menyebabkan harga naik karena permintaan naik, sebaliknya pengeluaran pemerintah turun berdampak PDRB turun sehingga jumlah uang beredar turun, mempengaruhi pendapatan turun menyebabkan harga turun karena permintaan turun. Jangka pendek perubahan pengeluaran pemerintah daerah, langsung mempengaruhi pendapatan dan harga karena

perubahan permintaan. Pengeluaran pemerintah naik, mempengaruhi pendapatan naik berdampak pada harga naik, karena permintaan naik, dan sebaliknya pengeluaran pemerintah turun, menyebabkan pendapatan turun dan mempengaruhi turunnya harga karena permintaan turun.

Penelitian ini memasukkan variabel *dummy* reformasi desentralisasi fiskal, yakni Sebelum reformasi desentralisasi fiskal pengeluaran pemerintah daerah relatif rendah dibandingkan sesudah reformasi desentralisasi fiskal, artinya ada peningkatan aliran dana masuk ke daerah (*capital inflow*) menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar (JUB) yang berpotensi inflasi.

2.4. Hipotesis

Penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut;

1. Belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi.
2. Belanja operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi.
3. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi.
4. Sebelum reformasi desentralisasi fiskal pengeluaran pemerintah daerah relatif rendah dibandingkan sesudah reformasi desentralisasi fiskal, artinya ada peningkatan aliran dana masuk ke daerah (*capital inflow*) menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar (JUB) yang berpotensi terjadinya inflasi. Pernyataan ini maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut; terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat inflasi sebelum dan sesudah reformasi desentralisasi fiskal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional Variabel

Variabel – variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah variabel kebijakan fiskal regional dari sisi pengeluaran yakni belanja pegawai (BPG), belanja operasional (BOP), belanja modal/Investasi (BMO), dan *dummy* reformasi desentralisasi fiskal (DRFO), sebagai variabel independen dan inflasi sebagai variabel dependen. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. (Indriantoro, Supomo 1999).

Dalam penelitian ini definisi operasional masing-masing variabel, sebagai berikut:

- a. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum di Kabupaten/Kota se NTT pada tahun 2001-2008. Dalam penelitian ini inflasi diukur dalam persen.
- b. Belanja pegawai (BPG) adalah pengeluaran konsumsi atau belanja langsung pemerintah daerah yang digunakan untuk membayar honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota se NTT ($t-(t-1)$) pada tahun 2001-2008. Dalam penelitian ini diukur dalam satuan milyar Rupiah.
- c. Belanja operasional (BOP) adalah pengeluaran konsumsi atau belanja langsung pemerintah daerah yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota se NTT ($t-(t-1)$) pada tahun 2001-2008. Dalam penelitian ini diukur dalam satuan milyar Rupiah

- d. Belanja modal/Investasi (BMO) adalah pengeluaran investasi atau belanja langsung pemerintah daerah yang digunakan untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan dalam program dan kegiatan pemerintahan di Kabupaten/Kota se NTT (t-(t-1)) pada tahun 2001-2008. Dalam penelitian ini diukur dalam satuan milyar Rupiah.
- e. Reformasi desentralisasi fiskal (DRFO) adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI, terkait dengan perubahan atau reformasi UU No. 22/1999 menjadi UU. No.32/2004, tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 menjadi UU No.33/2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perubahan terhadap kedua undang-undang otonomi daerah, dimana sebelum reformasi desentralisasi fiskal pengeluaran pemerintah daerah relatif rendah dibandingkan sesudah reformasi desentralisasi fiskal, artinya ada peningkatan aliran dana masuk ke daerah (*capital inflow*) menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar (JUB). Dalam penelitian ini diukur dengan dummy variabel 0 = sebelum reformasi desentralisasi fiskal (2001-2004); 1 = sesudah reformasi desentralisasi fiskal (2005-2008)

3.2. Metode Pengumpulan Data

Perbedaan informasi mengenai data inflasi versi pemerintah (BPS NTT) dengan Bank Indonesia Kupang, maka data inflasi yang digunakan adalah dari BPS karena data inflasi yang terdapat di Bank Indonesia bersumber dari BPS. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa penerbitan sumber data seperti Statistik Ekonomi – Keuangan Daerah Bank Indonesia Kupang, Perkembangan Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur, Statistik NTT dalam Angka dan sumber data yang lain. Periode pengamatan dari tahun 2001 – 2008.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah berdasarkan pertimbangan tertentu (*sampling purposive*). Sampel dari penelitian ini adalah 12 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, dengan alasan keduabelas kabupaten merupakan kabupaten induk sejak provinsi ini terbentuk pada tahun 1958, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan sarana prasarana yang cukup memadai, serta sebagai penopang pertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten/Kota baru.

Kabupaten/Kota yang dijadikan sampel adalah Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Barat.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Data yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah data sekunder *time series* dan *cross section* atau dengan kata lain data panel, yang telah diolah kembali, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Adapun data yang digunakan adalah data tahunan atau data *time series*, dengan jangka waktu dari tahun 2001-2008 (8 tahun), dan data *cross section* duabelas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. Data yang diperlukan sesuai dengan topik penelitian meliputi data-data sebagai berikut:

1. Data dari Biro Keuangan Sekda NTT yaitu data belanja pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, dimana data tersebut akan diklasifikasikan menurut belanja

langsung yakni belanja pegawai, belanja operasional, dan belanja modal di Kabupaten/Kota se NTT, tahun 2001-2008.

2. Data dari BPS Provinsi NTT yakni data inflasi di Kabupaten/Kota se NTT, tahun 2001-2008.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari beberapa sumber, antara lain:

1. Statistik Ekonomi – Keuangan Daerah, Bank Indonesia Kupang
2. Statistik Keuangan Daerah, Perkembangan Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
3. Statistik NTT dalam Angka.
4. www.BPS.go.id; www.bi.go.id, dan www.bpk.go.id

3.5. Metode Analisis

3.5.1. Model Regresi Data Panel

Analisis data panel adalah suatu metode mengenai gabungan dari data antar waktu (*time series*) dengan data antar individu (*cross section*). Untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data *cross section*, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit *cross section* yang sama di survey dalam beberapa waktu (Gujarati, 2003). Regresi dengan menggunakan data panel memberikan beberapa keunggulan dibandingkan dengan pendekatan standar *cross section* dan *time series*, diantaranya:

1. Data panel dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas dimana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien.

2. Data panel dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* atau *time series* saja.
3. Data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*.

Keunggulan dimiliki model data panel tersebut, ada beberapa permasalahan yang muncul dalam pemanfaatan data jenis panel yaitu permasalahan autokorelasi dan heterokedastisitas. Sementara itu ada permasalahan baru yang muncul seperti korelasi silang (*cross-correlation*) antar unit individu pada periode yang sama.

3.5.2. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis data panel untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen yakni belanja pegawai (BPG), belanja operasional (BOP), belanja modal/investasi (BMO), dan *dummy* reformasi desentralisasi fiskal (DRFO) terhadap variabel dependen inflasi. Model fungsi yang digunakan untuk mengetahui inflasi di Provinsi NTT yaitu:

$$\text{INFLASI} = f\{\text{BPG}, \text{BOP}, \text{BMO}, \text{DRFO}\} \quad (3.1)$$

Dalam bentuk persamaan menjadi:

$$Y_{it} = \lambda_0 + \lambda_1 \text{BPG}_{it} + \lambda_2 \text{BOP}_{it} + \lambda_3 \text{BMO}_{it} + \lambda_4 \text{RFO}_{it} + U_{it} \quad (3.2)$$

dimana; INFLASI = Inflasi.
 BPG = Belanja Pegawai
 BOP = Belanja Operasional
 BMO = Belanja Modal/Investasi
 DRFO = *Dummy* Reformasi Desentralisasi Fiskal
i = *cross section*.

t	=	<i>time series.</i>
λ_0	=	konstanta.
$\lambda_1, \dots, \lambda_4$	=	koefisien.
U	=	<i>error term.</i>

Penggunaan variabel *dummy* dapat digunakan *dummy* tempat ataupun *dummy* tahun. Dalam penelitian ini digunakan *fixed effects model* dengan *dummy* pada *time series* (tahun), alasannya yaitu antara tahun 2001-2008 kemungkinan (diduga) mempunyai perbedaan karakteristik yakni sebelum reformasi desentralisasi fiskal tahun 2001-2004 dan sesudah reformasi desentralisasi fiskal tahun 2005-2008 baik dari sisi penerimaan, pengeluaran, dan proporsi aliran dana perimbangan, kewenangan, hak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam penelitian ini tidak menggunakan *random effect model* (REM) karena jumlah observasi hanya 96 sedangkan untuk *random effect model* lebih sering digunakan untuk jumlah observasi lebih dari 1000 observasi (Gujarati 2003).

3.5.3. Pengujian Asumsi Model Klasik

3.5.3.1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas mempunyai pengertian bahwa ada hubungan linear yang “sempurna” atau pasti diantara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi. Konsekuensi adanya multikolinearitas adalah koefisien regresi variabel tidak tentu dan kesalahan menjadi tidak terhingga. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel *ortogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2009). Salah

satu munculnya multikolinearitas adalah R^2 sangat tinggi dan tidak satupun koefisien regresi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebas secara *skolastik*.

Model untuk mengetahui uji multikolinearitas adalah:

$$y = f(x_1, \dots, x_4) \dots\dots\dots (3.3)$$

$$x_1 = f(x_2, x_3) \quad X_4 = f(x_1, x_2)$$

$$x_2 = f(x_2, x_4) \quad X_5 = f(x_1, x_3)$$

$$X_3 = f(x_3, x_4) \quad X_6 = f(x_1, x_4)$$

Penelitian ini akan menggunakan *Auxiliary Regression* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih besar dari R^2 regresi *auxiliary* maka di dalam model tidak terdapat multikolinearitas.

3.5.3.2. Uji Autokorelasi

Salah satu uji formal yang paling populer untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson*. Uji ini sesungguhnya dilandasi oleh model *error* yang mempunyai korelasi sebagaimana telah ditunjukkan, yaitu:

$$\mu_t = \rho u_{t-1} + v_t \dots\dots\dots (3.4)$$

- dimana:
- u_t = *error* pada waktu ke-t
 - u_{t-1} = *error* pada waktu ke-(t-1)
 - ρ = koefisien autokorelasi lag -1 (untuk mengukur korelasi antara residual pada waktu ke-t dengan residual pada waktu (t-1))
 - V_t = *error* yang independen dan berdistribusi Normal dengan nilai tengah = 0, dan varian σ^2 .

Jika $\rho = 0$, maka dapat disimpulkan tidak ada serial korelasi di dalam residual. Oleh karena itu, uji ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \rho = 0$$

$$H_1 : \rho \neq 0$$

Statistik *Durbin-Watson* didefinisikan sebagai berikut:

$$DW = \frac{\sum_{t=2}^n (u_t - u_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n u_t^2} \dots\dots\dots (3.5)$$

dimana: $u_t = Y_t - \beta_0 - \beta_1 X_t = Y_t - Y_t$,

yaitu residual pada waktu ke- t.

$$u_t = Y_{t-1} - \beta_0 - \beta_1 X_{t-1} = Y_{t-1} - Y_{t-1},$$

yaitu residual pada waktu ke- (t-1).

Persamaan (3.8) dapat pula dituliskan sebagai berikut:

$$DW = 2 \left(1 - \frac{\sum u_t u_{t-1}}{\sum u_t^2} \right) = 2 (1 - \rho) \dots\dots\dots (3.6)$$

dimana:

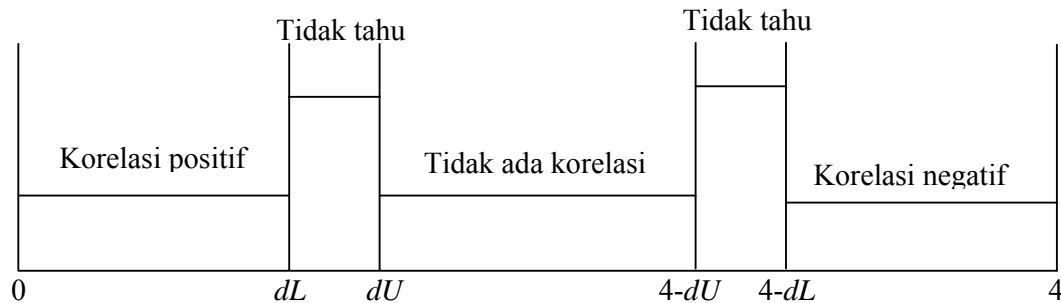
$$\rho = \frac{\sum u_t u_{t-1}}{\sum u_t^2} \dots\dots\dots (3.7)$$

Sebagaimana telah disebutkan bahwa ρ adalah koefisien autokorelasi yang mempunyai nilai : $-1 \leq \rho \leq 1$. Dengan demikian, berdasarkan persamaan (3.10) akan didapat nilai statistik DW, yaitu : $0 \leq d \leq 1$. Persamaan (3.10) juga mengartikan bahwa:

- Jika Statistik DW bernilai 2, maka ρ akan bernilai 0, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- Jika Statistik DW bernilai 0, maka ρ akan bernilai 1, yang berarti ada autokorelasi positif.

- Jika Statistik DW bernilai 4, maka ρ akan bernilai -1, yang berarti ada autokorelasi negatif.

Gambar 3
Aturan Membandingkan Uji Durbin-Watson dengan Tabel Durbin-Watson



Untuk kepentingan tersebut, DW telah mempunyai tabel yang digunakan sebagai pembandingan uji DW yang dilakukan, sehingga dapat disimpulkan dengan tepat ada atau tidak ada autokorelasi. Dalam membandingkan hasil penghitungan statistik DW dengan tabel DW, ternyata mempunyai aturan tersendiri.

Tabel DW terdiri dari dua nilai, yaitu batas bawah (d_L) dan batas atas (d_U). Nilai-nilai ini dapat digunakan sebagai pembandingan uji DW, dengan aturan sebagai berikut:

- Bila $DW < d_L$; berarti ada korelasi yang positif atau kecenderungannya $\rho = 1$.
- Bila $d_L \leq DW \leq d_U$; berarti kita tidak dapat mengambil kesimpulan apapun.
- Bila $d_U < DW < 4-d_U$; berarti tidak ada korelasi positif maupun negatif.
- Bila $4-d_U \leq DW \leq d_L$; berarti kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa.
- Bila $DW > 4-d_L$; berarti ada korelasi negatif.

3.5.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi yaitu homoskedastisitas yaitu variasi residual sama untuk semua pengamatan. Secara ringkas walaupun terdapat heteroskedastisitas maka penaksir OLS (*Ordinary Least Square*) tetap tidak bias dan konsisten tetapi penaksir tadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar (yaitu *asimtotik*). Menurut Gujarati (2003) bahwa masalah heteroskedastisitas nampaknya menjadi lebih biasa dalam data *cross section* dibandingkan dengan data *time series*.

Penelitian ini menggunakan uji *white heteroskedasticity* untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas.

3.5.3.4. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen, mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2009). Metode yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidak gangguan (μ) dalam penelitian ini adalah metode J-B test dan metode grafik. Metode J-B test dilakukan dengan menghitung skewness dan kurtosis, apabila J-B hitung < nilai X^2 (*Chi Square*) tabel, maka nilai residual berdistribusi normal. Model untuk mengetahui uji normalitas adalah:

$$J - B \text{ hitung} = \left[S^2/6 + \left(\frac{k-3}{24} \right)^2 \right] \dots\dots\dots (3.8)$$

dimana: S = Skewness statistik
 K = Kurtosis

Jika nilai $J - B$ hitung $>$ $J-B$ tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual U_t terdistribusi normal ditolak dan sebaliknya.

3.5.4. Pengujian Kriteria Statistik

Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (*estimator*) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada (Gujarati, 2003).

Uji statistik terdiri dari koefisien determinasi *Goodness of fit test* (R^2), pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (uji F), dan pengujian koefisien regresi parsial (uji t).

3.5.4.1. Koefisien Determinasi *Goodness of fit test* (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai (R^2) adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan satu variabel dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2009).

Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted*

(R^2) pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik (Ghozali, 2009). Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan formula:

$$R^2 = \frac{\sum y^{*2}}{\sum y^2} \dots\dots\dots (3.9)$$

dimana: y^* = nilai y estimasi
 y = nilai y aktual

3.5.4.2. Pengujian Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis yang digunakan:

1. $H_0 : b_1, \dots, b_4 = 0$ semua variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama
2. $H_1 : b_1, \dots, b_4 \neq 0$ semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama

Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{1 - R^2 / (N - 1)} \dots\dots\dots (3.10)$$

dimana: k = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta
 N = jumlah observasi

Pada tingkat signifikansi 10 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

- a) H_0 diterima dan H_a ditolak apabila F hitung $<$ F tabel, artinya variabel penjelas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

- b) H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya variabel penjelas secara bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

3.5.4.3. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Hipotesis yang digunakan:

1. $H_0 : b_1 = 0$ tidak ada pengaruh dari variabel belanja pegawai terhadap inflasi.
 $H_1 : b_1 > 0$ ada pengaruh positif dari variabel belanja pegawai terhadap inflasi.
2. $H_0 : b_2 = 0$ tidak ada pengaruh dari variabel belanja operasional atau belanja barang dan jasa terhadap inflasi
 $H_1 : b_2 > 0$ ada pengaruh positif dari variabel belanja operasional atau belanja barang dan jasa terhadap inflasi
3. $H_0 : b_3 = 0$ tidak ada pengaruh dari variabel belanja modal/investasi terhadap inflasi.
 $H_1 : b_3 > 0$ ada pengaruh positif dari variabel belanja modal/investasi terhadap inflasi.
4. $H_0 : b_4 = 0$ tidak ada perbedaan pengaruh dari variabel dummy reformasi desentralisasi fiskal terhadap inflasi.
 $H_1 : b_4 \neq 0$ ada perbedaan pengaruh dari variabel dummy reformasi desentralisasi fiskal terhadap inflasi.

Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus:

$$t = \frac{Bi - Bi^*}{SE(Bi)} \dots\dots\dots (3.11)$$

dimana: β_i = parameter yang diestimasi

β_i^* = nilai hipotesis dari β_i ($H_0 : \beta_i = \beta_i^*$)

$SE(\beta_i)$ = simpangan baku β_i

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1. Kondisi Umum

4.1.1. Geografis

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di selatan katulistiwa pada posisi $8^{\circ} - 12^{\circ}$ Lintang Selatan dan $118^{\circ} - 125^{\circ}$ Bujur Timur.

Batas-batas wilayah :

- * Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores
- * Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia
- * Sebelah Timur dengan Negara Timor Leste
- * Sebelah Barat dengan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

NTT merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 566 pulau, 432 pulau diantaranya sudah mempunyai nama dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama. Diantara 432 pulau yang sudah bernama terdapat 4 pulau besar: Flores, Sumba, Timor dan Alor (FLOBAMORA) dan pulau-pulau kecil antara lain: Babi, Pamana Besar, Panga Batang, Parmahan, Rusah (masuk wilayah Kabupaten Sikka) Samhila, Solor, Adonara (Kabupaten Flotim), Pulau Batang, Kisu, Lapang, Pura, Rusa, Trweng (Kabupaten Alor), Pulau Doo, Landu Manifon, Manuk, Semau (Kabupaten Kupang), Pulau Dana, Pulau Loren, Komodo, Rinca, Sehabi, Sebayur Kecil, Sebayur Besar Serayu Besar (Kabupaten Manggarai), Pulau Untelue (Kabupaten Ngada), Pulau Halura (Kabupaten Sumba Timur, dll. Dari seluruh pulau yang ada, 42 pulau telah berpenghuni sedangkan sisanya belum berpenghuni. Terdapat tiga pulau besar, yaitu pulau Flores, Sumba dan Timor, selebihnya adalah pulau-pulau kecil yang letaknya tersebar, komoditas yang dimiliki sangat terbatas dan sangat dipengaruhi oleh iklim.

Luas wilayah daratan 47.349,90 km² atau 2,49% luas Indonesia dan luas wilayah perairan ± 200.000 km² diluar perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Secara administratif, Propinsi Nusa Tenggara Timur terbagai atas 21 daerah tingkat II, yaitu: Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Maggarai Timur, Ngada, Nage Keo, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata, Alor, Belu, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Kupang, Kota Kupang, Rote-Ndao, Sumba Timur, Sumbah Tengah, Sumbah Barat daya, Sumba Barat dan Sabu Raijua sebagai kabupaten terbaru. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap 12 ibu kota kabupaten, dengan alasan keduabelas Kabupaten merupakan Kabupaten induk sejak provinsi ini terbentuk pada tahun 1958, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan sarana prasaran yang cukup memadai, serta sebagai penopang pertumbuhan ekonomi bagi kabupaten/kota baru.

4.1.2. Topografi

Apabila dilihat dari topografinya, maka wilayah NTT dapat dibagi atas 4 bagian besar, yaitu :

1. Agak bergelombang dengan kemiringan 17-26 %.
2. Bergelombang dengan kemiringan 27-50 %.
3. Berbukuti-bukit bergunung dengan kemiringan lebih besar dari 50 %.
4. Dataran banjir dengan kemiringan 0-30 %.

Keadaan topografi demikian mempunyai pengaruh pula terhadap pola kehidupan penduduk, antara lain pola pemukiman digunung-gunung, sehingga terdapat variasi adat dan tipologi kehidupan yang sangat besar antara suatu daerah dengan daerah lainnya.

4.1.3. Klimatologi

Seperti ditempat lain di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur hanya dikenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni sampai September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau.

Sebaliknya pada musim Desember sampai Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April sampai Mei, dan Oktober sampai November.

Walaupun demikian mengingat NTT dekat dengan Australia, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudra Pasifik sampai diwilayah NTT kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di NTT lebih sedikit dibanding wilayah yang dekat dengan Asia

4.2. Keadaan Perekonomian

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah indikator yang menggambarkan keadaan perekonomian penduduk di suatu wilayah/daerah. Ukuran yang dapat dihasilkan dari penghitungan PDRB antara lain adalah rata-rata pendapatan per kapita, struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

Sumbangan terbesar dalam PDRB tahun 2008 berasal dari sektor pertanian yakni sekitar 40,39 persen, sedangkan sumbangan terendah dari sektor listrik, gas, dan air bersih yakni hanya 0,41 persen. Bila di amati menurut Kabupaten, PDRB harga berlaku terbesar adalah Kota Kupang, yakni 3,59 trilyun Rupiah pada tahun 2008, kemudian disusul Kabupaten

Kupang sebesar 1,92 trilyun Rupiah. Sedangkan Kabupaten dengan PDRB harga berlaku terendah adalah Kabupaten Sumba Tengah dengan nilai sebesar 0,23 trilyun rupiah.

Walaupun PDRB harga berlaku meningkat dengan cukup tinggi yakni sebesar 12,98 persen pada tahun 2008, namun pada harga konstannya (pertumbuhan ekonomi NTT) hanya tumbuh sebesar 4,81 persen. Kondisi ini menunjukkan, walaupun secara absolut rata-rata pendapatan masyarakat meningkat namun daya beli dari pendapatan tersebut menurun.

Komposisi dari penggunaan PDRB NTT dalam kurun waktu 2004-2008 relatif tidak mengalami perubahan. Proporsi terbesar penggunaan PDRB NTT dalam kurun waktu tersebut adalah untuk memenuhi konsumsi rumah tangga. Sekitar seperlima sampai seperempat bagian dari total PDRB NTT setiap tahunnya digunakan untuk konsumsi pemerintah dengan kecenderungan meningkat. Proporsi penggunaan PDRB untuk konsumsi pemerintah pada tahun 2004 sebesar 18,54 persen, menurun menjadi 17,89 persen pada tahun 2005, meningkat menjadi 19,75 persen pada tahun 2006, kemudian naik menjadi 20,23 persen pada tahun 2007 dan 21,25 persen pada tahun 2008.

4.3. Penduduk dan Angkatan Kerja

Jumlah penduduk di Provinsi NTT (tahun 2007) sebanyak 4.448.873 jiwa sehingga kepadatan penduduknya relatif jarang yaitu sebesar 8.28 per km². Persebaran penduduk antar kabupatennya, dapat dikatakan tidak seimbang. Kabupaten Sumba Timur mempunyai kepadatan penduduk paling rendah dibanding wilayah lain yaitu 26 jiwa per km². Sebaliknya Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sikka memiliki kepadatan yang relatif tinggi yaitu 1.379 jiwa per km² dan 148 jiwa per km². Sedangkan kepadatan di kabupaten-kabupaten lain berkisar antara 54-115 jiwa per km².

Pendudukan Provinsi NTT berumur 15 tahun ke atas menurut kegiatan seminggu yang lalu tahun 2008, selalu melakukan kegiatan, dimana angkatan kerja mencapai 71,16% dan bukan angkatan kerja 2,65% atau berjumlah 3.045.015 orang, jelasnya dapat dilihat di Tabel 4. Penduduk Provinsi NTT adalah tipe orang raji dan mandiri, walaupun alam cukup gersang dan memerlukan kearifan lokal untuk mengatasi masalah.

Tabel 4
Penduduk Provinsi NTT Berumur 15 Tahun Ke Atas
Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu Tahun 2008

Kegiatan Seminggu Yang Lalu (1)	Banyaknya (2)	Persentase (3)
I. Angkatan Kerja	2.166.919	71,16
1. Bekerja	2.086.105	68,51
2. Mencari Pekerjaan	80.814	2,65
II. Bukan Angkatan Kerja	878.096	28,84
1. Sekolah	273.545	8,98
2. Mengurus Rumah tangga	449.855	14,77
3. Lainnya	154.696	5,08
Jumlah	3.045.015	100,00

Sumber BPS NTT dalam Angka, tahun 2010

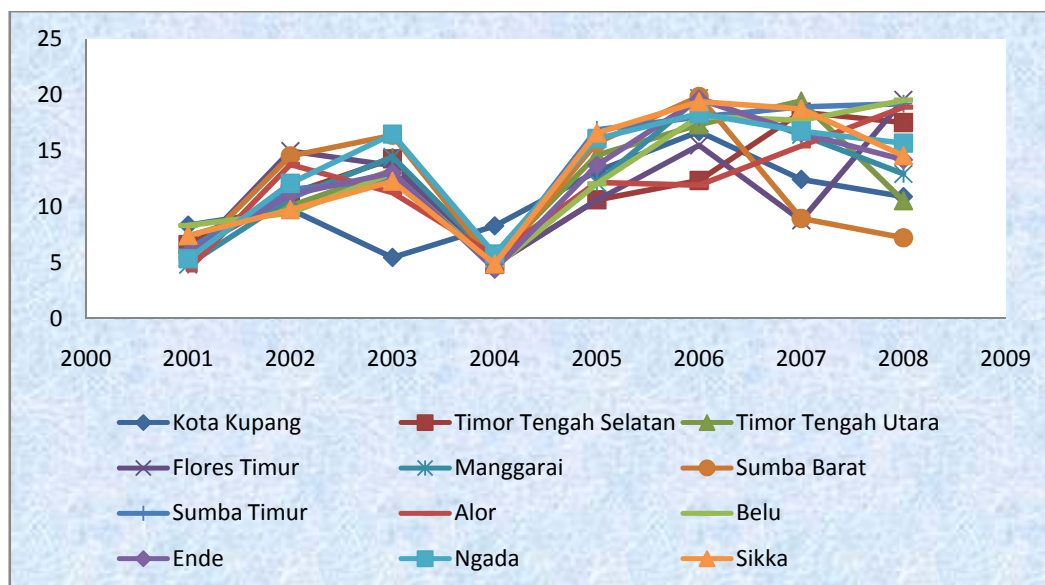
4.4. Perkembangan Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

Stabilitas harga juga merupakan salah satu sasaran dari tujuan pembangunan, baik secara nasional maupun secara regional. Salah satu ukuran stabilitas harga dapat dilihat dari inflasi yang terjadi di daerah-daerah, jika inflasi memiliki kecenderungan rendah dan stabil dapat dikatakan harga-harga stabil, demikian pula sebaliknya.

Perkembangan inflasi antar daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, berada di atas inflasi nasional. Secara umum dalam Gambar 4.1. berikut terlihat inflasi puncak sejak

desentralisasi fiskal diterapkan, terjadi pada tahun 2006 yakni mencapai angka 19,86% berasal dari Kabupaten Sumba Barat dan inflasi terendah mencapai angka 4,41% pada tahun 2004, berasal dari Kabupaten Ende. Pola perkembangan inflasi antar daerah sebelum reformasi desentralisasi fiskal tidak bervariasi dan cenderung bergerak ke arah yang sama sebaliknya sesudah reformasi desentralisasi fiskal sangat bervariasi dan cenderung bergerak ke arah yang berbeda, sebagai implikasi adanya kenaikan proporsi aliran dana perimbangan ke daerah, mendorong perubahan belanja pemerintah daerah. Perubahan ini karena adanya reformasi Undang-Undang desentralisasi fiskal, sehingga meningkatnya aliran dana perimbangan ke daerah yang mendorong pengeluaran pemerintah daerah meningkat sehingga permintaan barang dan jasa meningkat. Perubahan pengeluaran pemerintah yang ekspansif atau kontraksi akan mempengaruhi permintaan barang dan jasa. Penawaran barang dan jasa yang tidak seimbang akan menyebabkan harga tidak stabil.

Gambar 4.1
Perkembangan Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, Periode 2001-2008



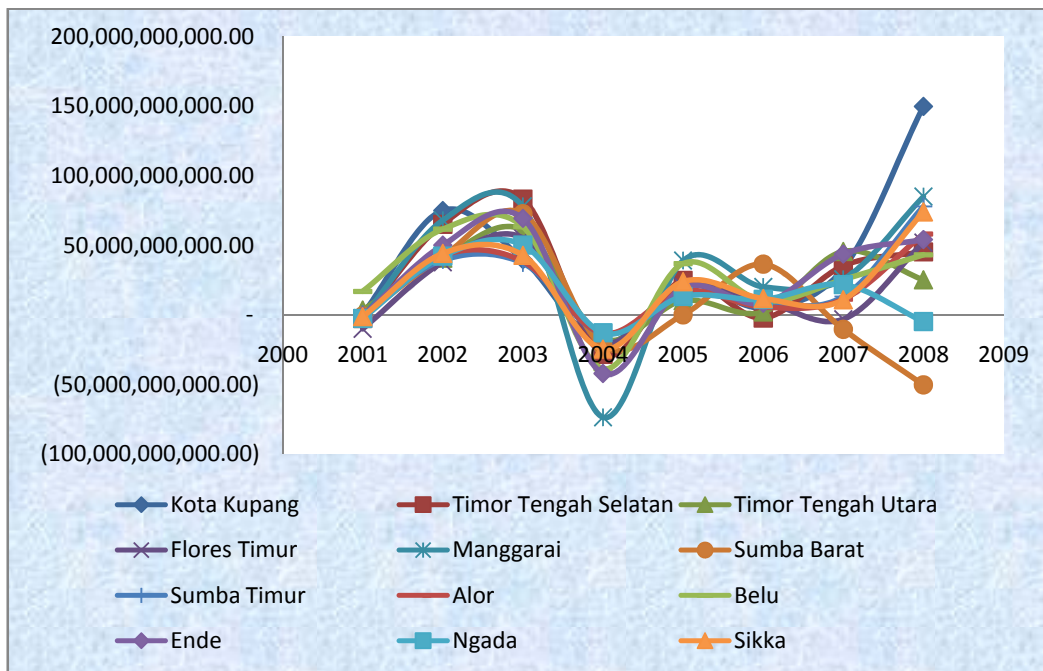
Sumber; BPS Provinsi NTT

4.5. Perkembangan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

4.5.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Honorarium diberikan kepada pihak yang melaksanakan program bertujuan untuk cepat tercapainya sasaran program dan kegiatan pemerintahan daerah, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dapat menjaga stabilitas harga atau inflasi terkendali.

Gambar 4.2
Perkembangan Belanja Pegawai Kabupaten/Kota di Provinsi NTT,
Periode 2001-2008



Sumber; Biro Keuangan SEKDA Provinsi NTT

Pengeluaran konsumsi yakni belanja pegawai yang bersifat ekspansif atau kontraksi akan mempengaruhi jumlah uang beredar dan stabilitas harga. Stabilitas harga diukur dari inflasi yang terjadi di setiap daerah, yang dipengaruhi perubahan pengeluaran konsumsi pemerintah yakni belanja pegawai. Output belanja pegawai adalah jasa, dan digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah bukan untuk kepentingan publik.

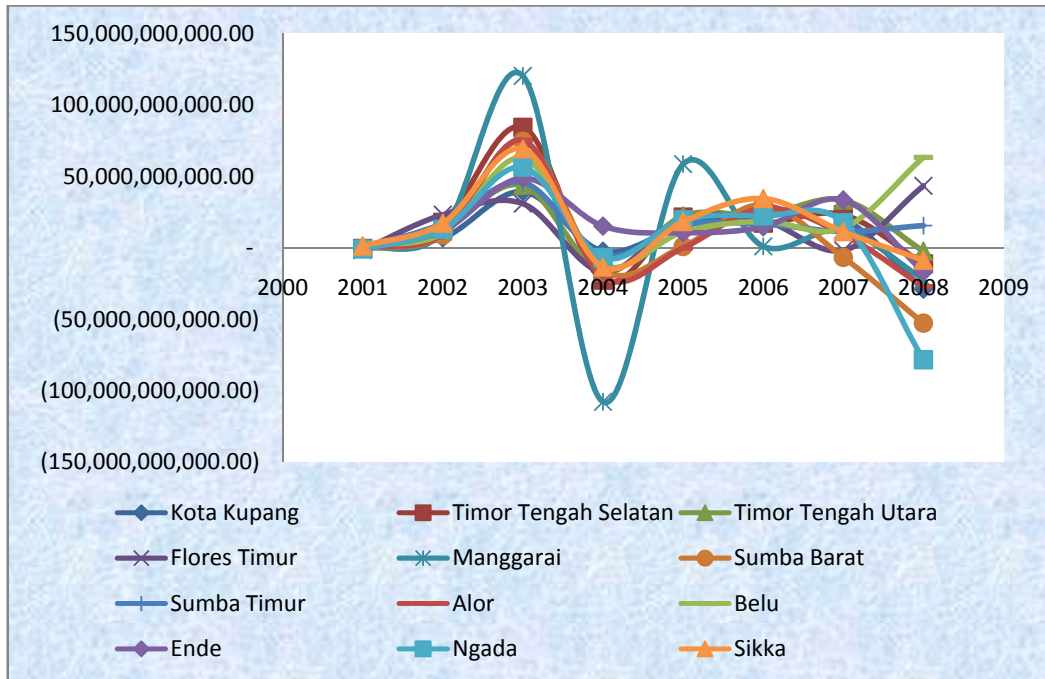
Perkembangan belanja pegawai sejak desentralisasi fiskal diterapkan pada tahun 2001, terjadi pola pergerakan yang sama pada periode sebelum reformasi desentralisasi fiskal, sebaliknya terjadi pola pergerakan yang bervariasi setelah reformasi. Secara umum terlihat dari Gambar 4.2 Perubahan kenaikan belanja pegawai tertinggi pada tahun 2008 yakni dari Kota Kupang, yaitu sebesar Rp. 149.840.656.649,629 dan perubahan penurunan belanja pegawai terendah terjadi pada tahun 2004 yakni dari Kabupaten Manggarai yaitu sebesar Rp. 73.516.410.955,187

4.5.2. Belanja Operasional

Belanja operasional digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Belanja operasional merupakan pengeluaran konsumsi pemerintah yang didukung oleh APBD yang bersumber dari dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan lain-lain yang sah. Belanja operasional yang bersifat ekspansif atau kontraksi akan mempengaruhi jumlah uang beredar dan stabilitas harga. Stabilitas harga diukur dari inflasi yang terjadi di setiap daerah dipengaruhi oleh perubahan belanja operasional.

Gambar 4.3
Perkembangan Belanja Operasional Kabupaten/Kota di Provinsi NTT,
Periode 2001-2008



Sumber; Biro Keuangan SEKDA Provinsi NTT

Pola pergerakan belanja operasional, sejak diterapnya desentralisasi fiskal, yakni pola pergerakan yang sama terjadi pada priode sebelum reformasi desentralisasi fiskal, sebaliknya setelah terjadi reformasi desentralisasi fiskal mengalami pola pergerakan yang bervariasi. Secara umum terlihat dari Gambar 4.3 Perubahan kenaikan belanja operasional tertinggi pada tahun 2003 berasal dari Kabupaten Manggarai, yakni sebesar Rp. 120.255.644.806,285 dan terjadi perubahan penurunan belanja operasional terendah pada tahun 2004 berasal dari Kabupaten Manggarai, sebesar Rp. 107.798.733.439,285

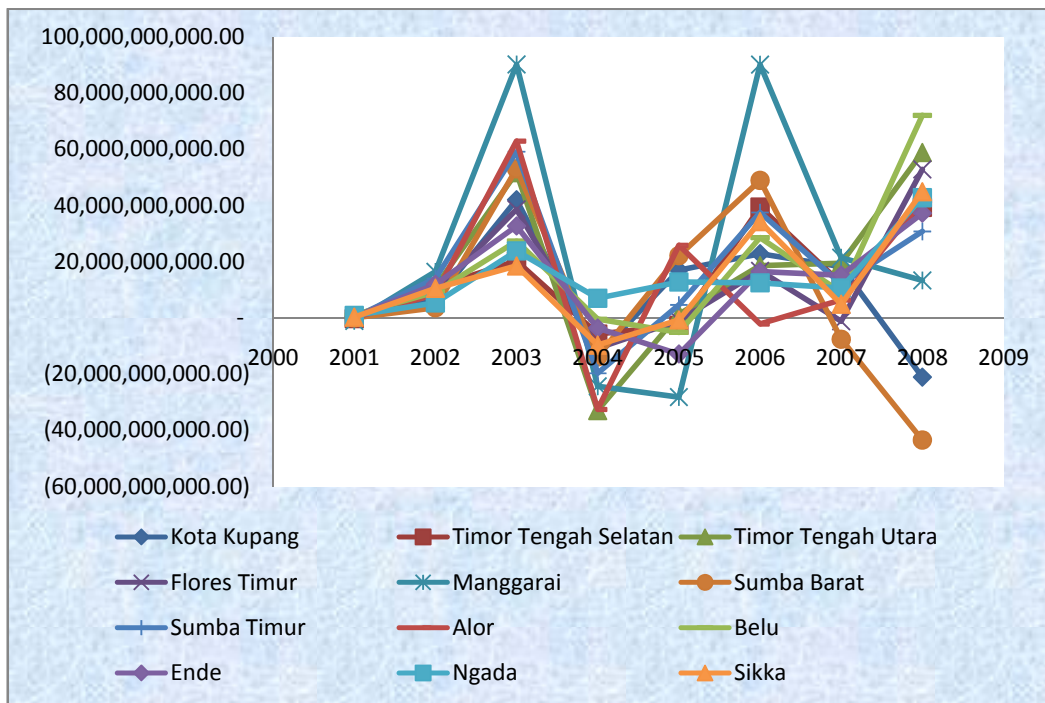
4.5.3. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal atau belanja investasi pemerintah digunakan untuk kepentingan publik, tujuan untuk meningkatkan produksi masyarakat serta meningkatkan akses mobilisasi ekonomi.

Pengeluaran investasi yakni belanja modal yang bersifat ekspansif atau kontraksi mempengaruhi jumlah uang beredar dan stabilitas harga. Stabilitas harga diukur dari inflasi yang terjadi disetiap daerah dipengaruhi oleh perubahan belanja modal. Output belanja modal adalah barang. Harga stabil apabila output dari belanja investasi dapat memenuhi permintaan, dan tidak terjadi kenaikan harga secara umum.

Pola pergerakan belanja modal, sejak diterapnya desentralisasi fiskal, yakni pola pergerakan yang sama terjadi pada priode sebelum reformasi desentralisasi fiskal, sebaliknya setelah terjadi reformasi desentralisasi fiskal mengalami pola pergerakan yang bervariasi. Secara umum terlihat dari Gambar 4.4 Perubahan kenaikan belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2003 sebesar Rp. 90.109.001.287,967 berasal dari Kabupaten Manggarai, dan terjadi perubahan penurunan belanja modal terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar Rp. 43.487.084.909,729 berasal dari kabupaten Sumba barat.

Gambar 4.4
Perkembangan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi NTT,
Periode 2001-2008



Sumber; Biro Keuangan SEKDA Provinsi NTT

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data terkumpul dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan. Penelitian ini menggunakan data panel, selanjutnya data diregresi dengan menggunakan *fixed effects model* (FEM), tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kebijakan fiskal regional terhadap inflasi di Provinsi NTT (periode 2001-2008). Variabel kebijakan fiskal regional, meliputi belanja pegawai, belanja operasional, belanja modal, dan dummy reformasi desentralisasi fiskal sebagai variabel independent dan inflasi sebagai variabel dependent. Pengolahan data dengan menggunakan alat bantuan *software Eviews 6, dan SPSS 17*.

5.1 Analisis Data

Pengolahan data menggunakan bantuan *software Eviews 6 dan SPSS 17* yang berguna untuk melakukan pengujian model data panel, meliputi pengujian penyimpangan asumsi klasik, pengujian kriteria statistik, dan pengujian hipotesis. Pengujian penyimpangan asumsi

klasik bertujuan untuk menjaga agar *Ordinary Least Square* (OLS) dapat menghasilkan estimator yang “paling baik” pada model regresi. Pengujian kriteria statistik bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pangaruh variabel penjelas/independent secara individual dan simultan dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji atas jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hasil output *Eviews* dan *SPSS 17* dapat dilihat pada lampiran 3 dan lampiran 11. Berikut ini disajikan ringkasan hasil outputnya.

Tabel 5.1
Ringkasan Hasil Regresi (periode 2001-2008)

Variabel	Koefisien	Standardized coefficients	T-Statistik
Belanja Pegawai	0.026427	0.188	2.822540 **
Belanja Operasional	0.029631	0.188	2.714716 **
Belanja Modal	0.053883	0.276	4.065916 ***
Dummy Reformasi Desentralisasi Fiskal	5.892603	0.614	10.72603 ***
R ²	0.720226		
F – statistik	58.56571		

Sumber : Hasil Olahan *Eviews 6* dan *SPSS 17*. Lampiran 3 dan lampiran 11

Keterangan:

- * Signifikan pada α 10%
- ** Signifikan pada α 5%
- *** Signifikan pada α 1%

5.1.1. Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas dengan menggunakan uji *Auxiliary Regression*, uji autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson*, uji heteroskedastisitas

menggunakan uji *white heteroskedasticity*, dan uji normalitas menggunakan uji Jarque-Bera test.

5.1.1.1.

Uji

Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dideteksi dengan menggunakan *Auxiliary Regression*. Model awal yaitu R^2 sebesar 0,720226 , nilai R^2 model awal tersebut dibandingkan dengan nilai R^2 model *Auxiliary Regression*. Karena R^2 model *Auxiliary Regression* lebih rendah dari R^2 model awal, maka dalam model tersebut tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Tabel 5.2
Uji Multikolinearitas

NO	Dependen Variabel	R^2
1.	BPG	0,306484
2.	BOP	0,358074
3.	BMO	0,334281
4.	DRFO	0,060748

Sumber : Hasil Olahan *Eviews 6* , Lampiran 4-7

5.1.1.2.

Uji

Autokorelasi

Salah satu uji formal yang paling populer untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson*. Uji ini sesungguhnya dilandasi oleh model *error* yang mempunyai korelasi sebagaimana telah ditunjukkan di bawah ini.

Diketahui bahwa:

$$\text{Nilai Observasi (n)} = 96$$

$$k-1 = 5-1 = 4$$

$$dL = 1,566$$

$$dU = 1,751$$

$$d / R^2 = 2,063$$

Hasil uji dapat dikatakan bahwa model ini tidak terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 5.3
Uji Autokorelasi Durbin-Watson (DW)

Autokorelasi Positif	Gejala Autokorelasi	Bebas Autokorelasi	Gejala Autokorelasi	Autokorelasi Negatif
0	dL	dU	$4-dU$	$4-dL$
0	1,566	1,751	2,249	2,434
			(2,063)	

Sumber : Lampiran 8

5.1.1.3.

Uji

Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan menggunakan uji *white heteroskedasticity*.

Tabel 5.4
Uji Heteroskedastisitas

NO	Dependen Variabel	T-Statistik	Probabilitas
1.	BPG	0,753770	0,4529
2.	BOP	0,516056	0,6071
3.	BMO	0,012951	0,9897
4	DRFO	1,326181	0,1881

Sumber : Hasil Olahan *Eviews 6* , Lampiran 9

Pada tabel diatas, signifikansi untuk variabel belanja pegawai (BP) sebesar 0,4529 belanja operasional (BOP) sebesar 0,6071 belanja modal (BMO) sebesar 0,9897 dan dummy reformasi desentralisasi fiskal (DFRO) sebesar 0,1881. Berdasarkan nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model.

5.1.1.4.

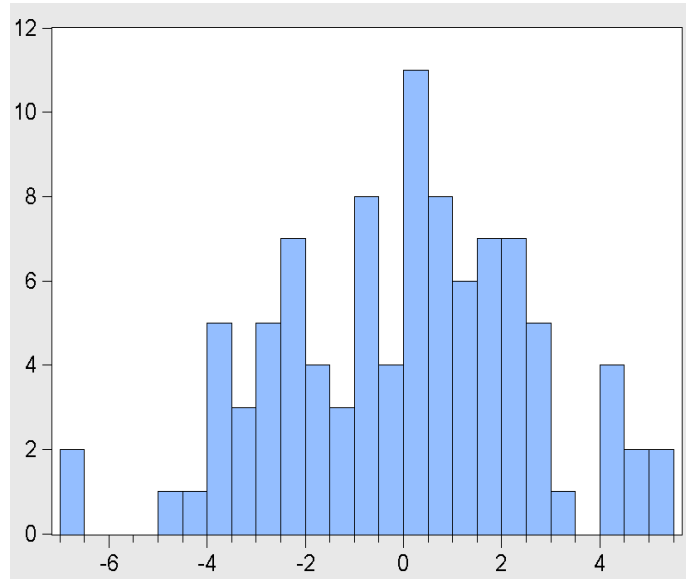
Uji

Normalitas

Penelitian ini akan menggunakan metode J-B test yang dilakukan dengan menghitung skweness dan kurtosis, apabila J-B hitung < nilai X^2 (*Chi Square*) tabel, maka nilai residual berdistribusi normal.

Tabel 5.5
Uji Normalitas

Jarque-Bera	0,613176
Probabilitas	0,735954



Sumber : Hasil Olahan *Eviews 6* , Lampiran 10

Pada penelitian dapat diketahui bahwa J-B hitung lebih kecil daripada nilai X^2 (*Chi Square*) tabel pada α 5% yaitu $0,613176 < 107,565$ maka nilai residual berdistribusi normal.

5.1.2. Analisis Hasil Regresi

Uji kriteria statistik meliputi; koefisien determinasi *Goodness of fit test* (R^2), pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (uji F), dan pengujian koefisien regresi parsial (uji t).

5.1.2.1. Koefisien Determinasi *Goodness of fit test* (R^2)

Hasil regresi diperoleh nilai Adjusted R^2 sebesar 0.720226 artinya bahwa 72 persen variabel terikat inflasi mampu dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebas BPG, BOP, BMO dan DRFO. Sedangkan 28 persen ($100 - 72$) sisanya dijelaskan oleh hal-hal lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nilai Adjusted R^2 yang besar tersebut menunjukkan hubungan yang sangat kuat antar variabel terikat dengan variabel bebas yang mempengaruhinya. Nilai yang besar tersebut juga menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini dapat digunakan.

5.1.2.2. Pengujian Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Berdasarkan model regresi utama (lampiran 3) diperoleh nilai F-hitung sebesar 58.56571 dengan probabilitas F-hitung sebesar 0,0000. Oleh karena sig sebesar $0,0000 < 0,05$ maka inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis penelitian mayor. Dengan kata lain, variabel belanja pegawai (BPG), belanja operasional (BOP), Belanja Modal (BMO), dan *dummy* reformasi desentralisasi fiskal (DRFO) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi.

Parameter yang digunakan untuk uji F dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan antara nilai F tabel dengan nilai F hitung. Dengan taraf nyata 5% dan df $(n-k-1) = 91$, didapat nilai F tabel sebesar 2,53.

Berdasarkan perhitungan dengan uji F diketahui bahwa $F_h (58.56571) > F_{t5\%} (2,53)$, sehingga inferensi yang diambil adalah menerima H_a dan menolak H_o . Dengan kata lain, hipotesis yang berbunyi “belanja pegawai (BPG), belanja operasional (BOP), belanja modal (BMO), dan *dummy* reformasi desentralisasi fiskal (DRFO) secara bersama-sama berpengaruh terhadap inflasi”, diterima taraf kepercayaan 95%.

5.1.2.3. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009).

Parameter yang digunakan untuk uji t dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan antara nilai t tabel dengan nilai t hitung. Dengan taraf nyata 5% dan df $(n-k)$ yaitu $(96-5) = 91$, di dapat nilai t tabel sebesar 1,671, setelah membandingkan nilai tersebut

dengan nilai t hitung dari hasil pengolahan data dengan *Eviews 6* maka dapat dinyatakan bahwa:

1. Pengaruh variabel belanja pegawai (BPG) terhadap inflasi.

Nilai t-hitung untuk variabel belanja pegawai (BPG) sebesar 2,8225 dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,0059. Oleh karena nilai t-hitung > t-tabel yaitu $2,8225 > 1,671$ maka inferensi yang diambil ialah secara parsial ada pengaruh yang signifikan dari variabel belanja pegawai (BPG) terhadap variabel inflasi.

2. Pengaruh variabel belanja operasional (BOP) terhadap inflasi.

Nilai t-hitung untuk variabel belanja operasional (BOP) sebesar 2.7147 dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,0079. Oleh karena nilai t-hitung > t-tabel yaitu $2,7147 > 1,671$ maka inferensi yang diambil ialah secara parsial ada pengaruh yang signifikan dari variabel belanja operasional (BOP) terhadap variabel inflasi.

3. Pengaruh variabel belanja modal (BMO) terhadap inflasi.

Nilai t-hitung untuk variabel belanja modal (BMO) sebesar 4,0659 dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,0001. Oleh karena nilai t-hitung > t-tabel yaitu $4,0659 > 1,671$ maka inferensi yang diambil ialah secara parsial ada pengaruh yang signifikan dari variabel belanja modal (BMO) terhadap variabel inflasi.

4. Pengaruh variabel *dummy* reformasi desentralisasi fiskal (DRFO) terhadap inflasi.

Nilai t-hitung untuk variabel *dummy* reformasi desentralisasi fiskal (DRFO) sebesar 10.720 dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,0000. Oleh karena nilai t-hitung > t-tabel yaitu $10.720 > 1,671$ maka inferensi yang diambil ialah secara parsial ada perbedaan pengaruh yang signifikan dari variabel *dummy* reformasi desentralisasi fiskal (DRFO) terhadap variabel inflasi.

5.1.3. Pengujian Hipotesis

Nilai t-hitung untuk variabel belanja pegawai (BPG) sebesar 2,8225 dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,0059. Oleh karena nilai t-hitung $>$ t-tabel yaitu $2,8225 > 1,671$ maka hipotesis H_0 ditolak dan menerima H_a artinya variabel belanja pegawai (BPG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel inflasi.

Nilai t-hitung untuk variabel belanja operasional (BOP) sebesar 2,7147 dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,0079. Oleh karena nilai t-hitung $>$ t-tabel yaitu $2,7147 > 1,671$ maka hipotesis H_0 ditolak dan menerima H_a yang berarti variabel belanja operasional (BOP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel inflasi.

Nilai t-hitung untuk variabel belanja modal (BMO) sebesar 4,0659 dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,0001. Oleh karena nilai t-hitung $>$ t-tabel yaitu $4,0659 > 1,671$ maka hipotesis H_0 ditolak dan menerima H_a artinya variabel belanja modal (BMO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel inflasi.

Nilai t-hitung untuk variabel *dummy* reformasi desentralisasi fiskal (DRFO) sebesar 10,7260 dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,0000. Oleh karena nilai t-hitung $>$ t-tabel yaitu $10,7260 > 1,671$ maka hipotesis H_0 ditolak dan menerima H_a yang berarti ada perbedaan yang signifikan dari variabel *dummy* reformasi desentralisasi fiskal (DRFO) terhadap variabel inflasi.

5.2 Pembahasan

5.2.1. Belanja Pegawai (BPG)

Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien kemiringan dari belanja pegawai sebesar 0.026427 artinya bahwa adanya kenaikan 1 (satu) milyar Rupiah belanja pegawai akan menyebabkan kenaikan inflasi daerah sebesar 0.026427 persen. Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Program dan kegiatan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan output dan kualitas pelayanan masyarakat, sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Belanja pegawai naik berarti jumlah uang beredar naik menyebabkan harga naik karena permintaan naik, sebaliknya belanja pegawai turun berarti jumlah uang beredar turun menyebabkan harga turun karena permintaan turun. Belanja pegawai merupakan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau digunakan oleh aparatur pemerintah bukan untuk kepentingan publik. Belanja pegawai dapat dilakukan efisiensi melalui pengurangan jumlah pegawai dan lebih di prioritaskan kepada peningkatan output berupa barang dan jasa. Harga dapat stabil jika jumlah barang di tawarkan sama atau melebihi permintaan.

5.2.2. Belanja Operasional (BOP)

Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien kemiringan dari belanja operasional sebesar 0.029631 artinya bahwa adanya kenaikan 1 (satu) milyar Rupiah belanja operasional akan menyebabkan kenaikan inflasi daerah sebesar 0.029631 persen. Belanja operasional digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Tujuan belanja operasional adalah untuk mendukung kegiatan dan program pemerintahan.

Belanja operasional naik berarti jumlah uang beredar naik menyebabkan harga naik karena permintaan naik, sebaliknya belanja operasional turun berarti jumlah uang beredar turun menyebabkan harga turun karena permintaan turun. Belanja operasional merupakan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah bukan untuk kepentingan publik. Belanja operasional dapat dilakukan efisiensi dan lebih diprioritaskan kepada peningkatan output berupa barang dan jasa. Harga dapat stabil jika jumlah barang ditawarkan sama atau melebihi permintaan.

5.2.3. Belanja Modal (BMO)

Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien kemiringan dari belanja modal sebesar 0.053883 artinya bahwa adanya kenaikan 1 (satu) milyar Rupiah belanja modal akan menyebabkan kenaikan inflasi daerah sebesar 0.053883 persen. Belanja modal atau belanja investasi digunakan untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Belanja modal merupakan komponen pengeluaran investasi pemerintah dan digunakan bagi kepentingan publik. Belanja modal mempunyai sasaran untuk meningkatkan produksi atau meningkatkan PDRB, selanjutnya stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

Belanja modal naik berarti PDRB naik, jumlah uang beredar naik menyebabkan pendapatan naik, dan harga stabil apabila permintaan tidak melebihi atau sama dengan penawaran, sebaliknya belanja modal turun berarti PDRB turun, jumlah uang beredar turun menyebabkan pendapatan turun, dan harga tidak stabil apabila permintaan melebihi penawaran. Belanja modal merupakan komponen pengeluaran investasi pemerintah dan untuk kepentingan publik.

5.2.4. Dummy Reformasi Desentralisasi Fiskal (DRFO)

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai t hitung $>$ t-tabel, berarti ada perbedaan perilaku inflasi sebelum dan sesudah reformasi desentralisasi fiskal di Propinsi Nusa Tenggara Timur, secara statistik berbeda dengan perilaku inflasi Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai benchmark. Salah satu faktor penyebab perbedaan perilaku inflasi adalah perubahan kedua Undang-Undang otonomi daerah, yakni perubahan Undang-Undang No.22/1999 menjadi Undang-Undang No.32/2004, tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang No.25/1999 menjadi Undang-Undang No.33/2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimana sebelum reformasi desentralisasi fiskal pengeluaran pemerintah daerah relatif rendah dibandingkan sesudah reformasi desentralisasi fiskal dimana pengeluaran pemerintahan daerah relatif tinggi, akibat perubahan proporsi aliran dana perimbangan, yang berpengaruh terhadap APBD sehingga terjadi perubahan jumlah uang beredar, dan mempengaruhi ketidak stabilan harga karena perubahan permintaan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Hasil analisis data yang dilakukan dalam jangka panjang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Belanja pegawai, belanja operasional dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. hal ini terjadi karena peningkatan permintaan barang dan jasa, tidak dapat diantisipasi oleh sisi penawaran,

- dengan kata lain telah terjadi inflasi akibat meningkatnya sisi permintaan (*demand pull inflation*).
2. *Dummy* reformasi desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perubahan terhadap kedua Undang-Undang otonomi daerah, No.22/1999 menjadi UU No.32/2004, tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang No.25/1999 menjadi UU No.33/2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebabkan terjadinya peningkatan transfer dana perimbangan ke daerah, sehingga mempengaruhi jumlah uang beredar, dengan demikian inflasi sesudah reformasi desentralisasi fiskal cenderung lebih tinggi.
 3. Belanja modal paling dominan menyebabkan inflasi di Provinsi NTT, terlihat dari standardized coefficients terbesar yakni sebesar 0,276. Hal ini mengindikasikan bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kelangkaan barang modal yang serius.

6.2. Saran

Uraian diatas dan hasil penelitian maka penulis dapat memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut;

Terdekteksi bahwa inflasi yang terjadi akibat tarikan permintaan (*demand pull inflation*) maka pemerintah harus mendorong tumbuhnya investasi untuk mengatasi problem sisi penawaran, salah satunya dengan membangun kembali pabrik semen Kupang yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah P Suseno. 2003. **Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia**, no.7 Jakarta, Pusat Pendidikan Dan Pengendalian Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Abimanyu *et.al.* 2009. **Era Baru Kebijakan Fiskal; Pemikiran Konsep, dan Implementasi**. Penerbit Kompas Jakarta.
- Afin Rifai. 2006. “Stabilitas Dan Dispersi Harga Dalam Skema Otonomi Daerah Di Indonesia”. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia**.
- Arifin, Syamsul. 1998. “Efektifitas Kebijakan Suku Bunga Dalam Rangka Stabilisasi Rupiah Di Masa Krisis. Jakarta”, **Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan**
- Aliman. 2003. “Analisis Penerapan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal di Indonesia”. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia**.
- Andrianus Fery, Niko Amelia. 2005. “Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia”. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia**
- Arif, Sritua. 1993. **Metodologi Penelitian Ekonomi**. Jakarta; Penerbit UI Press.
- Asmanto Priadi, soebagyo. 2006. “Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal Regional Terhadap Harga Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur, (periode 1995-2004)”. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia**.
- Badan Analisa Fiskal. 2004. **Kebijakan Fiskal: Pemikiran Konsep dan Implementasi. Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan**. Jakarta; Departemen Keuangan.
- Badan Analisa Fiskal dan Japan International Cooperation Agency. 2002. **Bunga Rampai Kebijakan Fiskal. Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan. Jakarta**. Departemen Keuangan.
- Bank Indonesia. “Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Berbagai edisi penerbitan dan website”; **www.bi.go.id . Jakarta**.
- Bank Indonesia. 2007. **Analisis Perilaku Inflasi di Propinsi JATENG**. Penerbit Bank Indonesia Semarang.
- Basuki. 2008. **Pengelolaan Keuangan Daerah**. Penerbit Kreasi Wacana Yogyakarta.
- Budi Riski Satya, Frita Amrita. 2006. “Stabilitas Harga Konvergensi Inflasi Dan Otonomi Daerah”. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia**
- Departemen Keuangan. “Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”. Berbagai edisi penerbitan. **www.depkeu.go.id. Diakses tanggal 31 Maret 2006. Jakarta**

- Dornbusch Rudiger. 2007. **Makroekonomi**, terjemahan, Penerbit PT. Media Global Edukasi
- Goeltom, Miranda S. 2000. “Perkembangan Ekonomi Makro Indonesia”. Makalah Seminar Sehari Kerjasama FE UGM dengan BI, MM UGM, 29 September.
- Ghozali Imam. 2005. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**. BP Undip Semarang.
- Ghozali Imam. 2009. **Ekonometrika, Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SSPS 17**. BP Undip Semarang.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrics*. Fourth Edition. New York : McGRAW-HILL.
- Insukindro.1992. **Modul Ekonometrika Dasar**. Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Khusaini Muhammad. 2006. **Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah Malang**; Penerbit BPFE UNIBRAW.
- Kuncoro Mudrajad. 2009, **Ekonomika Indonesia**. Edisi pertama, Yogyakarta; Penerbit UUP STIM YKPN Yokyakarta.
- Mankiw, N. Gregory, 2007. **Makroekonomi** terjemahan. Surabaya; Penerbit Erlangga
- Nanga Muana, 2001, **Makroekonomi, Teori Masalah dan Kebijakan**, Jakarta; Penerbit Raja Grafindo Prasada.
- Nur Indriantoro, Bambang Supomo. 1999. **Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Bisnis**; Jakarta; Penerbit Alex Media Komputindo.
- Nophirin. 2001 **Ekonomi Moneter**. Yogyakarta; Penerbit BPFE UGM.
- Rifai Mien A. 1995. **Pegangan Gaya Penulisan, Penyutungan, dan Penerbitan Karya-Ilmiah-Indonesia**. Yogyakarta; Penerbit gadjah Mada University Press.
- Simorangkir Iskandar. dkk. 2005. **Identifikasi Faktor-Faktor Penentu Inflasi Regional Dalam Era Otonomi Daerah**. Pusat Pendidikan dan Kebanksentralan, Bank Indonesia.
- Sukirno Sadono. 1999. **Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru**, Jakarta; Penerbit Rajawali Press
- Sunarjo Jatno. 2002. “Pengaruh faktor moneter terhadap laju inflasi di Indonesia (1994:01-2001:08)”. **Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan**.
- Sriwiyanto Hery Sulistio, Tetuko Rawidyo Putro. 2006. “Tantangan Dan Prospek Implementasi Kebijakan Stabilitas Harga Dengan Pendekatan Model New-

Keynesian *Monetary Policy* Dalam Perspektif Otonomi Daerah”. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.**

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Independensi Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah

Lampiran 1

**Data Belanja Pegawai, Belanja Operasional, Belanja Modal, Dummy Reformasi
Desentralisasi Fiskal, dan Inflasi Kabupaten/Kota Se Propinsi Nusa Tenggara Timur
(Periode 2001-2008)**

Kabupaten	Tahun	Belanja Pegawai	Δ Belanja Pegawai	Belanja Operasional	Δ Belanja Operasional	Belanja Modal	Δ Bel
K.Kupang	2000	19,551,523,000.00		3,220,941,000.00		2,446,643,000.00	
	2001	20,097,816,000.00	546,293,000.00	2,719,291,000.00	(501,650,000.00)	2,272,770,000.00	(173,873,000.00)
	2002	95,098,052,000.00	75,000,236,000.00	9,659,998,000.00	6,940,707,000.00	8,495,404,000.00	6,222,699,000.00
	2003	134,871,259,275.65	39,773,207,275.65	48,887,911,805.84	39,227,913,805.84	50,483,722,875.09	41,989,808,000.00
	2004	114,327,490,102.00	(20,543,769,173.65)	46,485,375,729.00	(2,402,536,076.84)	37,152,012,875.00	(13,331,709,000.00)
	2005	136,033,795,988.78	21,706,305,886.78	61,842,456,114.11	15,357,080,385.11	54,063,067,568.22	16,911,054,693.22
	2006	141,230,554,783.00	5,196,758,794.22	86,206,806,241.00	24,364,350,126.89	76,861,737,900.00	22,798,670,331.78
	2007	174,641,116,299.37	33,410,561,516.37	106,600,536,248.44	20,393,730,007.44	95,044,728,303.95	18,183,000,403.95
	2008	324,481,772,949.00	149,840,656,649.63	77,666,724,650.00	(28,933,811,598.44)	73,918,542,700.00	(21,120,238,000.00)
TTS	2000	46,003,754,000.00		4,211,986,000.00		2,370,176,000.00	
	2001	43,370,874,000.00	(2,632,880,000.00)	3,735,194,000.00	(476,792,000.00)	2,046,137,000.00	(323,039,000.00)
	2002	108,464,980,000.00	65,094,106,000.00	21,512,571,000.00	17,777,377,000.00	12,911,616,000.00	10,865,445,000.00
	2003	191,696,200,121.87	83,231,220,121.87	105,822,301,126.76	84,309,730,126.76	33,142,564,461.59	20,230,948,461.59
	2004	163,371,367,391.00	(28,324,832,730.87)	83,170,530,114.00	(22,651,771,012.76)	27,323,575,417.00	(5,818,088,044.59)
	2005	188,203,243,706.95	24,831,876,315.95	104,606,894,581.12	21,436,364,467.12	24,629,944,089.68	(2,693,949,000.00)
	2006	185,988,532,000.00	(2,214,711,706.95)	121,815,574,411.00	17,208,679,829.88	63,985,430,000.00	39,355,856,000.00
	2007	221,212,463,977.78	35,223,931,977.78	144,885,940,420.92	23,070,366,009.92	76,103,480,557.49	12,118,050,557.49
	2008	266,521,121,166.74	45,308,657,188.96	133,702,804,750.00	(11,183,135,670.92)	115,393,486,900.00	39,290,006,342.51
TTU	2000	21,809,743,000.00		2,518,325,000.00		2,233,288,000.00	
	2001	25,327,357,000.00	3,517,614,000.00	3,532,803,000.00	1,014,478,000.00	2,674,705,000.00	441,417,000.00
	2002	66,126,833,000.00	40,799,476,000.00	17,830,367,000.00	14,297,564,000.00	13,703,323,000.00	11,028,616,000.00
	2003	127,135,751,454.90	61,008,918,454.89	61,515,308,191.11	43,684,941,191.11	65,337,470,962.06	51,634,147,962.06
	2004	110,174,709,568.95	(16,961,041,885.94)	44,666,507,156.00	(16,848,801,035.11)	32,315,537,978.00	(33,021,532,978.00)
	2005	120,379,994,214.89	10,205,284,645.94	66,975,002,446.38	22,308,495,290.38	33,592,494,804.17	1,276,956,826.17
	2006	122,477,062,461.00	2,097,068,246.11	89,591,508,019.00	22,616,505,572.62	52,130,294,153.61	18,537,799,349.44

	2007	168,070,077,060.48	45,593,014,599.48	122,942,625,779.52	33,351,117,760.52	71,536,191,181.70	19,40
	2008	193,257,138,890.65	25,187,061,830.17	120,502,604,080.87	(2,440,021,698.65)	130,359,221,281.42	58,82
FLOTIM	2000	39,890,811,000.00		3,647,635,000.00		1,753,751,000.00	
	2001	29,890,869,000.00	(9,999,942,000.00)	2,071,162,000.00	(1,576,473,000.00)	2,453,403,000.00	69
	2002	67,722,014,000.00	37,831,145,000.00	25,152,990,000.00	23,081,828,000.00	11,512,370,000.00	9,05
	2003	122,973,512,410.71	55,251,498,410.71	55,993,171,058.04	30,840,181,058.04	50,091,862,661.55	38,57
	2004	103,206,261,717.25	(19,767,250,693.46)	38,958,810,295.52	(17,034,360,762.52)	39,235,122,575.45	(10,85
	2005	123,533,151,407.73	20,326,889,690.48	58,825,182,876.54	19,866,372,581.02	38,250,812,094.16	(98
	2006	133,511,212,110.00	9,978,060,702.27	77,940,818,152.00	19,115,635,275.46	54,939,632,143.00	16,68
	2007	130,406,152,692.01	(3,105,059,417.99)	76,128,154,873.58	(1,812,663,278.42)	53,661,905,579.74	(1,27
	2008	182,299,293,994.00	51,893,141,301.99	119,458,390,991.00	43,330,236,117.42	106,475,345,352.00	52,81
Mangga	2000	46,099,051,000.00		4,377,376,000.00		3,159,366,000.00	
	2001	43,822,104,000.00	(2,276,947,000.00)	3,482,361,000.00	(895,015,000.00)	2,013,481,000.00	(1,14
	2002	111,804,382,000.00	67,982,278,000.00	14,617,509,000.00	11,135,148,000.00	18,410,983,000.00	16,39
	2003	189,725,378,847.19	77,920,996,847.19	134,873,153,806.29	120,255,644,806.29	108,519,984,287.97	90,10
	2004	116,208,967,892.00	(73,516,410,955.19)	27,074,420,367.00	(107,798,733,439.29)	84,125,363,146.00	(24,39
	2005	155,235,111,773.84	39,026,143,881.84	85,577,166,346.45	58,502,745,979.45	55,872,994,554.96	(28,25
	2006	175,379,952,671.00	20,144,840,897.16	86,582,719,570.00	1,005,553,223.56	145,913,441,553.00	90,04
	2007	201,056,623,006.23	25,676,670,335.23	99,258,945,747.90	12,676,226,177.90	167,276,039,040.20	21,36
	2008	286,043,038,841.00	84,986,415,834.77	77,243,894,580.00	(22,015,051,167.90)	180,516,133,768.00	13,24
Subar	2000	29,365,687,000.00		3,120,705,000.00		1,788,529,000.00	
	2001	28,516,458,000.00	(849,229,000.00)	2,799,345,000.00	(321,360,000.00)	1,799,581,000.00	1
	2002	70,642,021,000.00	42,125,563,000.00	11,710,313,000.00	8,910,968,000.00	5,398,898,000.00	3,59
	2003	143,330,929,708.44	72,688,908,708.44	86,312,171,801.31	74,601,858,801.31	58,425,271,003.65	53,02
	2004	120,869,728,845.00	(22,461,200,863.44)	70,475,895,180.00	(15,836,276,621.31)	44,566,726,711.00	(13,85
	2005	120,872,037,122.17	2,308,277.17	71,378,115,431.52	902,220,251.52	66,672,987,591.03	22,10
	2006	157,296,533,218.00	36,424,496,095.83	101,424,499,950.00	30,046,384,518.48	115,571,299,018.00	48,89
	2007	146,916,278,727.09	(10,380,254,490.91)	94,731,331,959.86	(6,693,167,990.14)	107,944,560,709.73	(7,62
	2008	96,644,351,449.00	(50,271,927,278.09)	42,041,692,467.00	(52,689,639,492.86)	64,457,475,800.00	(43,48
Sutim	2000	20,808,215,000.00		3,381,987,000.00		2,146,662,000.00	

	2001	21,379,013,000.00	570,798,000.00	3,339,661,000.00	(42,326,000.00)	2,196,683,000.00	5
	2002	60,764,805,000.00	39,385,792,000.00	20,285,106,000.00	16,945,445,000.00	16,135,344,000.00	13,93
	2003	97,930,837,708.12	37,166,032,708.12	65,925,240,569.43	45,640,134,569.43	75,178,356,711.61	59,04
	2004	84,655,205,033.00	(13,275,632,675.12)	60,467,094,535.00	(5,458,146,034.43)	55,435,035,333.00	(19,743
	2005	99,330,473,059.13	14,675,268,026.13	76,306,761,435.11	15,839,666,900.11	59,988,606,305.76	4,55
	2006	107,946,636,916.00	8,616,163,856.87	92,777,407,154.00	16,470,645,718.89	97,391,911,466.00	37,40
	2007	121,202,765,275.76	13,256,128,359.76	104,170,714,562.70	11,393,307,408.70	109,351,892,031.21	11,95
	2008	199,065,070,198.00	77,862,304,922.24	119,683,903,468.00	15,513,188,905.31	140,046,688,334.00	30,69
Alor	2000	23,447,859,000.00		2,827,558,000.00		1,815,784,000.00	
	2001	22,491,310,000.00	(956,549,000.00)	2,946,975,000.00	119,417,000.00	1,806,042,000.00	(9
	2002	65,301,272,000.00	42,809,962,000.00	12,363,286,000.00	9,416,311,000.00	10,205,168,000.00	8,39
	2003	103,732,613,344.65	38,431,341,344.65	87,395,756,111.04	75,032,470,111.04	73,069,117,342.67	62,86
	2004	90,530,358,508.00	(13,202,254,836.65)	67,015,006,765.00	(20,380,749,346.04)	40,467,503,802.00	(32,601
	2005	107,562,455,695.05	17,032,097,187.05	66,876,866,764.02	(138,140,000.98)	66,260,537,215.05	25,79
	2006	113,260,549,270.00	5,698,093,574.95	94,596,344,132.00	27,719,477,367.98	64,069,485,654.00	(2,191
	2007	124,492,479,453.64	11,231,930,183.64	103,977,364,617.65	9,381,020,485.65	70,423,189,520.04	6,35
	2008	182,545,991,349.00	58,053,511,895.36	76,790,066,673.00	(27,187,297,944.65)	111,918,804,206.00	41,49
Belu	2000	24,676,822,000.00		2,601,399,000.00		1,459,962,000.00	
	2001	41,607,394,000.00	16,930,572,000.00	3,968,033,000.00	1,366,634,000.00	2,505,823,000.00	1,04
	2002	103,220,150,000.00	61,612,756,000.00	14,069,200,000.00	10,101,167,000.00	11,669,120,000.00	9,16
	2003	166,501,347,495.27	63,281,197,495.27	76,855,221,690.95	62,786,021,690.95	38,940,125,457.27	27,27
	2004	127,849,259,294.00	(38,652,088,201.27)	64,738,524,434.00	(12,116,697,256.95)	38,459,183,305.00	(480
	2005	164,666,683,657.59	36,817,424,363.59	75,825,782,438.86	11,087,258,004.86	33,262,831,161.35	(5,190
	2006	174,711,357,812.00	10,044,674,154.41	94,294,004,204.00	18,468,221,765.14	61,814,243,541.00	28,55
	2007	200,119,778,936.80	25,408,421,124.80	108,007,261,306.25	13,713,257,102.25	70,803,941,469.46	8,98
	2008	243,293,524,930.00	43,173,745,993.20	171,231,615,773.00	63,224,354,466.75	142,820,830,728.00	72,01
Ende	2000	30,799,788,000.00		3,038,799,000.00		2,061,327,000.00	
	2001	29,927,806,000.00	(871,982,000.00)	2,400,774,000.00	(638,025,000.00)	2,461,414,000.00	40
	2002	80,029,343,000.00	50,101,537,000.00	14,280,386,000.00	11,879,612,000.00	14,341,909,000.00	11,88
	2003	149,331,404,863.17	69,302,061,863.17	63,027,242,097.53	48,746,856,097.53	46,995,540,376.39	32,65

	2004	107,227,031,786.00	(42,104,373,077.17)	78,185,962,100.00	15,158,720,002.47	43,328,833,484.00	(3,666,833,484.00)
	2005	126,806,219,208.18	19,579,187,422.18	88,680,229,285.86	10,494,267,185.86	30,426,742,107.12	(12,902,219,208.18)
	2006	135,150,863,675.00	8,344,644,466.82	103,309,182,306.00	14,628,953,020.14	46,866,121,713.00	16,437,675,000.00
	2007	178,838,251,932.52	43,687,388,257.52	136,703,777,318.15	33,394,595,012.15	62,015,551,022.78	15,149,338,251.93
	2008	232,884,896,379.00	54,046,644,446.48	119,886,386,875.00	(16,817,390,443.15)	99,228,485,490.00	37,211,896,379.00
Ngada	2000	30,156,714,000.00		2,657,774,000.00		2,108,829,000.00	
	2001	27,681,839,000.00	(2,474,875,000.00)	1,754,769,000.00	(903,005,000.00)	2,952,972,000.00	84,156,839.00
	2002	69,948,996,000.00	42,267,157,000.00	14,630,922,000.00	12,876,153,000.00	8,248,616,000.00	5,290,996,000.00
	2003	120,195,851,848.42	50,246,855,848.42	70,977,967,205.46	56,347,045,205.46	32,043,364,303.38	23,791,851,848.42
	2004	107,360,012,381.00	(12,835,839,467.42)	64,091,141,596.00	(6,886,825,609.46)	38,985,689,338.00	6,948,012,381.00
	2005	120,676,862,703.25	13,316,850,322.25	83,612,242,229.85	19,521,100,633.85	51,739,321,752.79	12,756,862,703.25
	2006	131,881,814,302.00	11,204,951,598.75	105,814,943,589.00	22,202,701,359.15	64,176,487,625.00	12,431,814,302.00
	2007	153,647,614,594.46	21,765,800,292.46	123,278,662,467.19	17,463,718,878.19	74,768,187,629.36	10,591,614,594.46
	2008	148,890,681,146.00	(4,756,933,448.46)	44,903,516,473.00	(78,375,145,994.19)	117,498,234,960.00	42,730,681,146.00
Sikka	2000	28,525,444,000.00		2,864,613,000.00		2,841,008,000.00	
	2001	27,277,561,000.00	(1,247,883,000.00)	4,082,149,000.00	1,217,536,000.00	3,055,724,000.00	21,029,561,000.00
	2002	71,443,370,000.00	44,165,809,000.00	21,318,388,000.00	17,236,239,000.00	13,562,256,000.00	10,509,370,000.00
	2003	114,279,693,135.59	42,836,323,135.59	90,381,540,554.58	69,063,152,554.58	32,024,114,635.20	18,463,135,590.00
	2004	89,722,996,868.00	(24,556,696,267.59)	76,905,751,680.00	(13,475,788,874.58)	22,327,726,659.00	(9,696,996,868.00)
	2005	113,614,739,157.27	23,891,742,289.27	95,187,668,969.61	18,281,917,289.61	21,571,189,099.71	(750,739,157.27)
	2006	125,357,816,269.00	11,743,077,111.73	129,621,692,571.00	34,434,023,601.39	55,798,605,738.00	34,221,816,269.00
	2007	136,209,713,089.16	10,851,896,820.16	140,842,701,960.77	11,221,009,389.77	60,628,944,445.23	4,831,713,089.16
	2008	210,209,894,129.00	74,000,181,039.84	132,125,028,734.00	(8,717,673,226.77)	105,504,764,669.00	44,834,894,129.00

Sumber : Biro Keuangan SEKDA Provinsi NTT dan Badan Pusat Statistik Provinsi NTT; NTT Dalam Angka

Lampiran 2

Data Mentah

Tahun	Δ Belanja Pegawai (BPG) dalam milyar Rupiah	Δ Belanja Operasional (BOP) dalam milyar Rupiah	Δ Belanja Modal (BMO) dalam milyar Rupiah	Dummy Reformasi Desentralisasi Fiskal (DRFO)	Inflasi
1	0.55	(0.50)	(0.17)	0	8.34
2	75.00	6.94	6.22	0	9.77
3	39.77	39.23	41.99	0	5.45
4	(20.54)	(2.40)	(13.33)	0	8.28
5	21.71	15.36	16.91	1	13.16
6	5.20	24.36	22.80	1	16.72
7	33.41	20.39	18.18	1	12.44
8	149.84	(28.93)	(21.13)	1	10.9
9	(2.63)	(0.48)	(0.32)	0	6.6
10	65.09	17.78	10.87	0	11.16
11	83.23	84.31	20.23	0	14.28
12	(28.32)	(22.65)	(5.82)	0	4.83
13	24.83	21.44	(2.69)	1	10.61
14	(2.21)	17.21	39.36	1	12.34
15	35.22	23.07	12.12	1	18.46
16	45.31	(11.18)	39.29	1	17.53
17	3.52	1.01	0.44	0	7.37
18	40.80	14.30	11.03	0	10.05
19	61.01	43.68	51.63	0	13.28
20	(16.96)	(16.85)	(33.02)	0	5.31
21	10.21	22.31	1.28	1	14.61
22	2.10	22.62	18.54	1	17.34
23	45.59	33.35	19.41	1	19.46

24	25.19	(2.44)	58.82	1	10.53
25	(10.00)	(1.58)	0.70	0	5.42
26	37.83	23.08	9.06	0	14.98
27	55.25	30.84	38.58	0	13.67
28	(19.77)	(17.03)	(10.86)	0	4.87
29	20.33	19.87	(0.98)	1	10.58
30	9.98	19.12	16.69	1	15.49
31	(3.11)	(1.81)	(1.28)	1	8.76
32	51.89	43.33	52.81	1	19.56
33	(2.28)	(0.90)	(1.15)	0	4.81
34	67.98	11.14	16.40	0	10.75
35	77.92	120.26	90.11	0	14.45
36	(73.52)	(107.80)	(24.39)	0	5.28
37	39.03	58.50	(28.25)	1	12.16
38	20.14	1.01	90.04	1	19.72
39	25.68	12.68	21.36	1	16.44
40	84.99	(22.02)	13.24	1	12.93
41	(0.85)	(0.32)	0.01	0	5.39
42	42.13	8.91	3.60	0	14.54
43	72.69	74.60	53.03	0	16.39
44	(22.46)	(15.84)	(13.86)	0	4.91
45	0.00	0.90	22.11	1	15.71
46	36.42	30.05	48.90	1	19.86
47	(10.38)	(6.69)	(7.63)	1	8.95
48	(50.27)	(52.69)	(43.49)	1	7.22
49	0.57	(0.04)	0.05	0	6.21
50	39.39	16.95	13.94	0	11.55

51	37.17	45.64	59.04	0	12.46
52	(13.28)	(5.46)	(19.74)	0	5.1
53	14.68	15.84	4.55	1	16.89
54	8.62	16.47	37.40	1	18.04
55	13.26	11.39	11.96	1	18.94
56	77.86	15.51	30.69	1	19.22
57	(0.96)	0.12	(0.01)	0	4.34
58	42.81	9.42	8.40	0	13.77
59	38.43	75.03	62.86	0	11.25
60	(13.20)	(20.38)	(32.60)	0	5.61
61	17.03	(0.14)	25.79	1	12.16
62	5.70	27.72	(2.19)	1	11.92
63	11.23	9.38	6.35	1	15.44
64	58.05	(27.19)	41.50	1	18.9
65	16.93	1.37	1.05	0	8.32
66	61.61	10.10	9.16	0	9.43
67	63.28	62.79	27.27	0	12.99
68	(38.65)	(12.12)	(0.48)	0	4.59
69	36.82	11.09	(5.20)	1	12.05
70	10.04	18.47	28.55	1	18.06
71	25.41	13.71	8.99	1	17.74
72	43.17	63.22	72.02	1	19.53
73	(0.87)	(0.64)	0.40	0	5.88
74	50.10	11.88	11.88	0	11.09
75	69.30	48.75	32.65	0	13.03
76	(42.10)	15.16	(3.67)	0	4.41
77	19.58	10.49	(12.90)	1	13.71

78	8.34	14.63	16.44	1	19.62
79	43.69	33.39	15.15	1	16.59
80	54.05	(16.82)	37.21	1	14.2
81	(2.47)	(0.90)	0.84	0	5.33
82	42.27	12.88	5.30	0	12.09
83	50.25	56.35	23.79	0	16.5
84	(12.84)	(6.89)	6.94	0	5.76
85	13.32	19.52	12.75	1	16.09
86	11.20	22.20	12.44	1	18.33
87	21.77	17.46	10.59	1	16.76
88	(4.76)	(78.38)	42.73	1	15.69
89	(1.25)	1.22	0.21	0	7.42
90	44.17	17.24	10.51	0	9.73
91	42.84	69.06	18.46	0	12.27
92	(24.56)	(13.48)	(9.70)	0	4.87
93	23.89	18.28	(0.76)	1	16.58
94	11.74	34.43	34.23	1	19.4
95	10.85	11.22	4.83	1	18.76
96	74.00	(8.72)	44.88	1	14.56

Lampiran 3

**Hasil Regresi Utama
(Periode 2001-2008)**

EViews - [Equation: MMMS Workfile: MSSS::Untitled\]

File Edit Object View Proc Quick Options Window Help

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids

Dependent Variable: INFLASI
 Method: Least Squares
 Date: 02/18/10 Time: 19:26
 Sample: 1 96
 Included observations: 96

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BPG	0.026427	0.009363	2.822540	0.0059
BOP	0.029631	0.010915	2.714716	0.0079
BMO	0.053883	0.013252	4.065916	0.0001
DRFO	5.892603	0.549374	10.72603	0.0000
C	7.550803	0.412634	18.29904	0.0000
R-squared	0.720226	Mean dependent var		12.23792
Adjusted R-squared	0.707929	S.D. dependent var		4.826368
S.E. of regression	2.608345	Akaike info criterion		4.805987
Sum squared resid	619.1152	Schwarz criterion		4.939547
Log likelihood	-225.6874	Hannan-Quinn criter.		4.859974
F-statistic	58.56571	Durbin-Watson stat		2.062422
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 4

Uji Multikolinieritas (1)

EViews - [Equation: MMMS Workfile: MSSS::Untitled\]

File Edit Object View Proc Quick Options Window Help

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids

Dependent Variable: BPG

Method: Least Squares

Date: 02/18/10 Time: 21:11

Sample: 1 96

Included observations: 96

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BOP	0.411190	0.113727	3.615602	0.0005
BMO	0.367531	0.142504	2.579089	0.0115
DRFO	3.686465	6.105282	0.603816	0.5475
C	10.78561	4.455020	2.421001	0.0174
R-squared	0.306484	Mean dependent var		22.96896
Adjusted R-squared	0.283869	S.D. dependent var		34.32141
S.E. of regression	29.04432	Akaike info criterion		9.616297
Sum squared resid	77608.70	Schwarz criterion		9.723145
Log likelihood	-457.5823	Hannan-Quinn criter.		9.659487
F-statistic	13.55244	Durbin-Watson stat		2.161101
Prob(F-statistic)	0.000000			

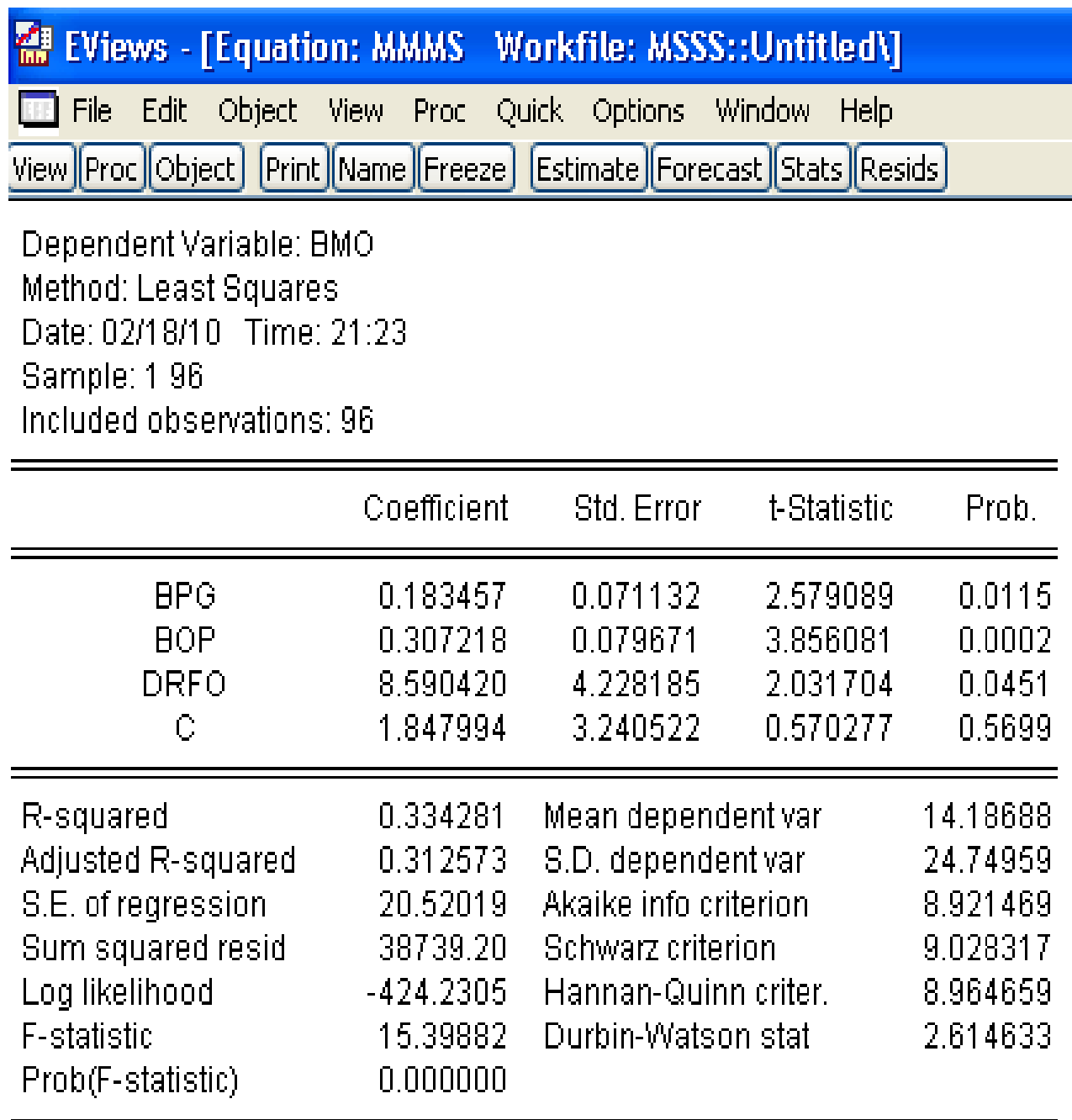
Lampiran 5

Uji Multikolinieritas (2)

EViews - [Equation: MMMS Workfile: MSSS::Untitled]				
File Edit Object View Proc Quick Options Window Help				
View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids				
Dependent Variable: BOP				
Method: Least Squares				
Date: 02/18/10 Time: 21:20				
Sample: 1 96				
Included observations: 96				
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BPG	0.302572	0.083685	3.615602	0.0005
BMO	0.452890	0.117448	3.856081	0.0002
DRFO	-9.012686	5.162750	-1.745714	0.0842
C	3.597736	3.923544	0.916961	0.3616
R-squared	0.358074	Mean dependent var		12.46625
Adjusted R-squared	0.337142	S.D. dependent var		30.60159
S.E. of regression	24.91462	Akaike info criterion		9.309560
Sum squared resid	57107.92	Schwarz criterion		9.416408
Log likelihood	-442.8589	Hannan-Quinn criter.		9.352750
F-statistic	17.10625	Durbin-Watson stat		2.515643
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 6

Uji Multikolinieritas (3)



Dependent Variable: BMO
 Method: Least Squares
 Date: 02/18/10 Time: 21:23
 Sample: 1 96
 Included observations: 96

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BPG	0.183457	0.071132	2.579089	0.0115
BOP	0.307218	0.079671	3.856081	0.0002
DRFO	8.590420	4.228185	2.031704	0.0451
C	1.847994	3.240522	0.570277	0.5699

R-squared	0.334281	Mean dependent var	14.18688
Adjusted R-squared	0.312573	S.D. dependent var	24.74959
S.E. of regression	20.52019	Akaike info criterion	8.921469
Sum squared resid	38739.20	Schwarz criterion	9.028317
Log likelihood	-424.2305	Hannan-Quinn criter.	8.964659
F-statistic	15.39882	Durbin-Watson stat	2.614633
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 7

Uji Multikolinieritas (4)

EViews - [Equation: MMMS Workfile: MSSS::Untitled\]

File Edit Object View Proc Quick Options Window Help

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids

Dependent Variable: DRFO

Method: Least Squares

Date: 02/18/10 Time: 21:25

Sample: 1 96

Included observations: 96

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BPG	0.001071	0.001773	0.603816	0.5475
BOP	-0.003558	0.002038	-1.745714	0.0842
BMO	0.004999	0.002460	2.031704	0.0451
C	0.448839	0.062788	7.148514	0.0000
R-squared	0.060748	Mean dependent var		0.500000
Adjusted R-squared	0.030120	S.D. dependent var		0.502625
S.E. of regression	0.494997	Akaike info criterion		1.472245
Sum squared resid	22.54205	Schwarz criterion		1.579093
Log likelihood	-66.66775	Hannan-Quinn criter.		1.515434
F-statistic	1.983422	Durbin-Watson stat		0.945763
Prob(F-statistic)	0.121927			

Lampiran 8

Uji Autokorelasi Durbin-Watson (DW)

Autokorelasi Positif	Gejala Autokorelasi	Bebas Autokorelasi	Gejala Autokorelasi	Autokorelasi Negatif
0	dL	dU	$4-dU$	$4-dL$
0	1,566	1,751	2,249	2,434

(2,063)

Lampiran 9

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.715284	Prob. F(4,91)	0.5836
Obs*R-squared	2.926333	Prob. Chi-Square(4)	0.5702
Scaled explained SS	2.352490	Prob. Chi-Square(4)	0.6712

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 02/18/10 Time: 21:33

Sample: 1 96

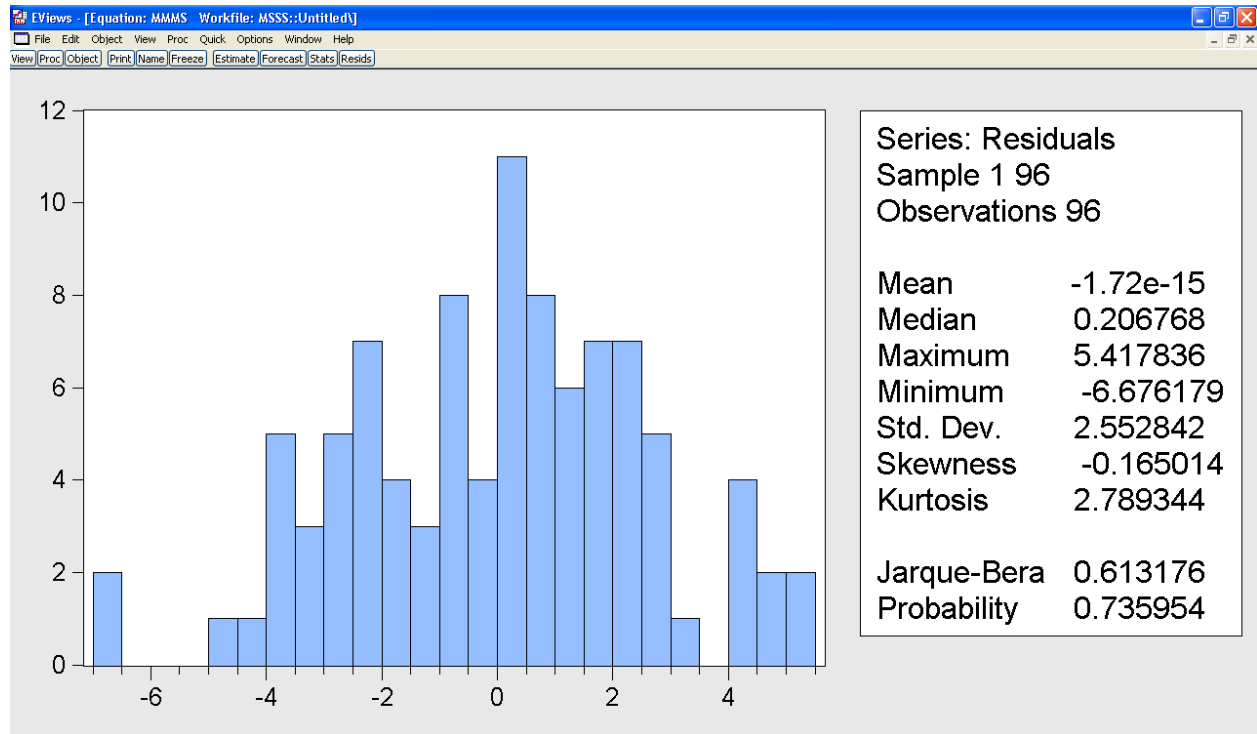
Included observations: 96

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.518825	1.456378	3.102783	0.0026
BPG^2	0.000253	0.000335	0.753770	0.4529
BOP^2	0.000251	0.000487	0.516056	0.6071
BMO^2	9.41E-06	0.000727	0.012951	0.9897
DRFO^2	2.445965	1.844367	1.326181	0.1881

R-squared	0.030483	Mean dependent var	6.449117
Adjusted R-squared	-0.012134	S.D. dependent var	8.672034
S.E. of regression	8.724486	Akaike info criterion	7.220822
Sum squared resid	6926.616	Schwarz criterion	7.354382
Log likelihood	-341.5995	Hannan-Quinn criter.	7.274809
F-statistic	0.715284	Durbin-Watson stat	2.101177
Prob(F-statistic)	0.583613		

Lampiran 10

Uji Normalitas



Lampiran 11

Hasil Regresi Utama dengan SPSS 17
(Periode 2001-2008)

hasil penelitian 1.spv [Document3] - SPSS Statistics Viewer

File Edit View Data Transform Insert Format Analyze Graphs Utilities Add-ons Window Help

Output
Log
Regression
Title
Notes
Active Dataset
Variables Entered/Removed
Model Summary
ANOVA
Coefficients
Residuals Statistics

```

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER BPG BOP BMO DFRO
  /RESIDUALS DURBIN.
    
```

→ **Regression**

[DataSet0] C:\Documents and Settings\Marius Masri Sadipun.PRIVATE\703EBD\My

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Dummy Reformasi Desentralisasi Fiskal, Belanja Operasional, Belanja Pegawai, Belanja Modal ^a		Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.849 ^a	.720	.708	2.60834	2.062

a. Predictors: (Constant), Dummy Reformasi Desentralisasi Fiskal, Belanja Operasional, Belanja Pegawai, Belanja Modal
b. Dependent Variable: Inflasi

- Output
- Log
- Regression
 - Title
 - Notes
 - Active Dataset
 - Variables Entered/Removed
 - Model Summary
 - ANOVA
 - Coefficients
 - Residuals Statistics

Operasional, Belanja Pegawai, Belanja Modal
 b. Dependent Variable: Inflasi

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	1593.799	4	398.450	58.1
	Residual	619.115	91	6.803	
	Total	2212.914	95		

a. Predictors: (Constant), Dummy Reformasi Desentralisasi Fiskal, Belanja Operasional, Belanja Pegawai, Belanja Modal

b. Dependent Variable: Inflasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Stand. Coef.
		B	Std. Error	
1	(Constant)	7.551	.413	
	Belanja Pegawai	.026	.009	
	Belanja Operasional	.030	.011	
	Belanja Modal	.054	.013	
	Dummy Reformasi Desentralisasi Fiskal	5.893	.549	

a. Dependent Variable: Inflasi

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Predicted Value	1.0995	20.3381	12.2379	4.09595
Residual	-6.67618	5.41784	.00000	2.55284
Std. Predicted Value	-2.719	1.978	.000	1.000
Std. Residual	-2.560	2.077	.000	.979

a. Dependent Variable: Inflasi